

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SOSIALISASI
PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK DI DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



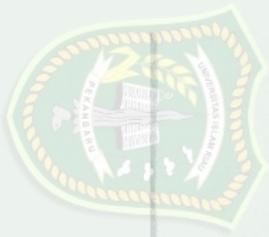
**KIKI DIAN PERLINA
NPM : 187110386**

**UNIVERSITAS
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Kiki Dian Perlina
NPM : 187110386
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Kegiatan Sosialisasi Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk disidangkan.

Pekanbaru, 17 Oktober 2022

Turut Menyetujui

Program Studi Administrasi Publik
Ketua

Pembimbing



Liris Suriani, S.Sos., M.Si



Prof. Dr. H. Sufian Hamim, M.Si

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Kiki Dian Perlina
NPM : 187110386
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Kegiatan Sosialisasi Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 17 Oktober 2022

Ketua,

Sekretaris,


Prof. Dr. H. Sufian Hamim, M.Si


Herman, S.Sos., M.Si

Anggota,


Drs. Parjiyana, M.Si

Mengetahui

Wakil Dekan Bidang Akademik,

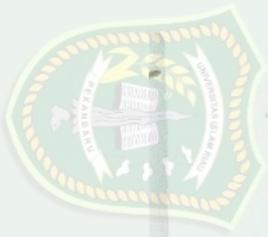

Indra Safri, S.Sos., M.Si

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK.

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU



**KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1091/UIR-FS/KPTS/2022**

TENTANG

TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
b. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**
- Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Kiki Dian Perlina
N P M	: 187110386
Program Studi	: Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Program Kegiatan Sosialisasi Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai
 - Struktur Tim :

1. Prof. Dr. H. Sufian H. ., M.Si.	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Herman, S.Sos., M,Si	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Drs. Parjiyana, M,Si.	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Andri Kurniawan, B.PM., M.Si	Sebagai Notulen
 - Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas;
 - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 21 September 2022 M
24 Safar 1444 H
DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU,



DR. SYAHRUL AKMAL LATIF., M.Si
NPK. 080102337

- Tembusan :**
- Rektor UIR
 - Ka. Biro Keuangan UIR

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1091/UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 21 September 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 22 september jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

N a m a : Kiki Dian Perlina
NPM : 187110386
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Kegiatan Sosialisasi Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai

Nilai Ujian : Angka : " 85 " ; Huruf : " A "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. Sufian H. ., M.Si.	Ketua	1.
2.	Herman, S.Sos., M.Si	Sekretaris	2.
3.	Drs. Parjiyana, M.Si.	Anggota	3.
4.	Andri Kurniawan, B.PM., M.Si	Notulen	4.

Pekanbaru, 22 September 2022
An. Dekan,



Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Kiki Dian Perlina
NPM : 187110386
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Kegiatan Sosialisasi Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai

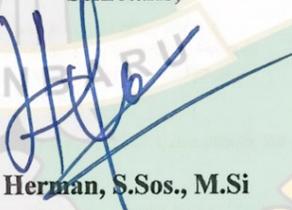
Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 17 Oktober 2022

Ketua,

An. Tim Penguji
Sekretaris,

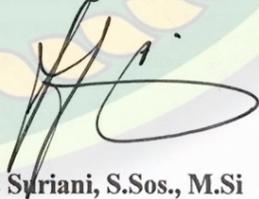

Prof. Dr. H. Sufian Hamim, M.Si


Herman, S.Sos., M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan Bidang Akademik

Turut Menyetujui
Ketua Program Studi


Indra Safri, S.Sos., M.Si


Lilis Suriani, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU

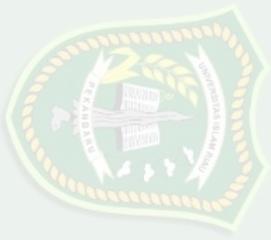
KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr, Wb

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk skripsi ini dapat penulis selesaikan. Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Program Kegiatan Sosialisasi Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai” ini penulis tulis dan ajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) pada Program Studi Program Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

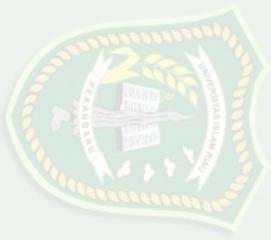
Penulis dengan keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per bab skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan. Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak yang turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salut dan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu dan menyediakan fasilitas pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, khususnya jurusan Administrasi Publik.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.



3. Ibu Lilis Suriani, S.Sos, M.Si sebagai Ketua Program Studi Administrasi Publik yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
4. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama duduk dibangku kuliah.
5. Bapak Prof. Dr. H. Sufian Hamim S.H, M.Si yang telah menyediakan waktu dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis terutama dalam proses pembimbingan berlangsung.
6. Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Administrasi Publik yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang mana telah memberikan ilmu dan wawasan yang besar sehingga membantu penulis menyusun skripsi penelitian ini.
7. Bapak/Ibu Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak berjasa melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi yang penulis butuhkan.
8. Ayahanda Almizar dan Ibunda Fitriati tercinta atas segala dukungan, semangatnya, dan bantuan, dorongan serta doa restu yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak/Ibu pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dan masyarakat yang telah bersedia memberikan waktunya dalam tujuan penyelesaian penelitian skripsi ini.

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



10. Sahabat Putri Hendrayani atas segala bantuan untuk bisa selalu menemani dan memberikan dorongan semangat selama penulis dalam menyusun skripsi ini.

11. Bestie Maria Octavia dan Indah Irawati teman seperjuangan dalam membuat, menemani segala urusan dan menyusun skripsi penelitian ini sampai selesai.

12. Semua teman-teman seperjuangan terutama teman 501, Pratiwi Deswari, Zekki Parma, Kevin Dwi Anggara, Ihsanul Oktari Syafra, Suryandi Amar Yusron, Janesha Pramono, dan Miguel Demora serta teman-teman kelas B jurusan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2018 yang selalu memberikan semangat dan kebersamaannya.

Hanya Allah SWT yang dapat memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda kesehatan serta kemuliaan. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta bagi Nusa dan Bangsa, dan dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 29 Agustus 2022

Penulis,

Ttd

Kiki Dian Perlina

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
SURAT KETERANGAN PENGUJIAN UJIAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA KOMPREHENSIF SKRIPSI	v
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
SURAT PERNYATAAN	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	15
1.3 Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Manfaat Penelitian.....	15
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	17
2.1 Studi Kepustakaan.....	17
2.1.1 Konsep dan Teori Administrasi Publik.....	17
2.1.2 Konsep dan Teori Organisasi Publik.....	20
2.1.3 Konsep dan Teori Manajemen Publik.....	24
2.1.4 Konsep dan Teori Pelaksanaan.....	26
2.1.5 Konsep dan Teori Sosialisasi.....	31
2.1.6 Konsep Kekerasan.....	33
2.2 Penelitian Terdahulu.....	38
2.3 Kerangka Pikir.....	41
2.4 Konsep Operasional.....	43
2.5 Operasional Variabel.....	45
2.6 Teknik Pengukuran.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	48
3.1 Tipe Penelitian.....	48
3.2 Lokasi Penelitian.....	48
3.3 Populasi dan Sampel.....	49
3.4 Teknik Penarikan Sampel.....	50
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	50
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.7 Teknik Analisis Data.....	52



BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	53
4.1 Gambaran Singkat Kota Dumai	53
4.1.1 Keadaan Geografis	53
4.1.2 Kependudukan	54
4.2 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai	55
4.2.1 Visi dan Misi	55
4.2.2 Struktur Organisasi	57
4.2.3 Jumlah Pegawai	61
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
5.1 Identitas Responden	62
5.1.1 Jenis Kelamin	62
5.1.2 Tingkat Usia	64
5.1.3 Tingkat Pendidikan	65
5.1.4 Pekerjaan	66
5.2 Pembahasan Hasil Penelitian	67
5.2.1 Rumusan Rencana Kegiatan	68
5.2.2 Pelaksanaan Kegiatan	75
5.2.3 Pengawasan (Pengendalian Kegiatan)	81
BAB VI PENUTUP	90
6.1 Kesimpulan	90
6.2 Saran-saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 1.1	Jumlah Kasus Perempuan di Kota Dumai Tahun 2021	9
Tabel 1.2	Jumlah Kasus Anak di Kota Dumai Tahun 2021	10
Tabel 1.3	Program Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Di Bidang Perlindungan Hak Perempuan	13
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	38
Tabel 2.2	Operasional Variabel Pelaksanaan Program Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai	45
Tabel 3.1	Populasi dan Sampel Penelitian Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai	49
Tabel 4.1	Luas Wilayah Kota Dumai	54
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Kota Dumai Berdasarkan Kecamatan ..	55
Tabel 5.1	Kategori Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	63
Tabel 5.2	Kategori Responden Berdasarkan Tingkat Usia	64
Tabel 5.3	Kategori Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	65
Tabel 5.4	Kategori Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan	66
Tabel 5.5	Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pada Indikator Rumusan Rencana Kegiatan (Pegawai)	69
Tabel 5.6	Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pada Indikator Rumusan Rencana Kegiatan (Masyarakat)	71
Tabel 5.7	Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pada Indikator Pelaksanaan Kegiatan (Pegawai)	76
Tabel 5.8	Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pada Indikator Pelaksanaan Kegiatan (Pegawai)	78
Tabel 5.9	Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pada Indikator Pengawasan (Pengendalian Kegiatan) (Pegawai)	82



Tabel 5.10	Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pada Indikator Pengawasan (Pengendalian Kegiatan) (Pegawai).....	83
Tabel 5.11	Rekapitulasi Tanggapan Responden (Pegawai).....	86
Tabel 5.12	Rekapitulasi Tanggapan Responden (Masyarakat).....	87



UNIVERSITAS ISLAM RIAU



DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
Gambar 1.1	Badan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai	5
Gambar 1.2	Jumlah Korban Kekerasan pada Anak Priode Januari sampai Desember 2020 di UPT PPPA Kota Dumai.....	10
Gambar 1.3	Jumlah Kaus Kekerasan Anak UPT PPA Kota Dumai ...	12
Gambar 2.1	Kerangka Pikir Tentang Pelaksanaan Program Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Dumai	42
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.....	60

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

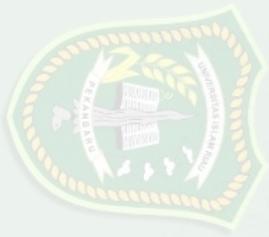
DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
Lampiran 1	Kuesioner Penelitian Tentang Pelaksanaan Program Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.....	94
Lampiran 2	Daftar Pertanyaan Wawancara Tentang Pelaksanaan Program Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai	107
Lampiran 3	Rekapitulasi Tanggapan Responden.....	113
Lampiran 4	Tanggapan Hasil Wawancara	114
Lampiran 5	Dokumentasi Penelitian.....	120
Lampiran 6	Surat Keterangan Pembimbing.....	125
Lampiran 7	Surat Keterangan/Rekomendasi Penelitian	126

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :
PERPUSTAKAAN SOEMAN HS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Komprehensif bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kiki Dian Perlina
NPM : 187110386
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Kegiatan Sosialisasi Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan fakultas dan universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 Agustus 2022
Pelaku Pernyataan



Kiki Dian Perlina

UNIVERSITAS

ISLAM RIAU

ABSTRAK

PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

Oleh

Kiki Dian Perlina

NPM :187110386

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pelaksanaan program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai. Penelitian ini menggunakan tipe kuantitatif dan kualitatif saling melengkapi. Populasi penelitian berasal dari pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dan masyarakat yang mengalami kekerasan. Pengambilan sampel secara sensus dan simple random sampling dengan total 25 orang dari jumlah populasi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melaksanakan observasi, penyebaran kuesioner, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dikumpulkan dan di kelompokkan menurut jenis data. Kemudian dianalisis berdasarkan penjelasan dan uraian berdasarkan tabel persentase. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa pelaksanaan sosialisasi program kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh DPPPA Kota Dumai secara keseluruhan berada pada kategori cukup terlaksana. Hasil ini jelas menggambarkan bahwa DP3A Kota Dumai dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan alokasi anggaran yang minim jumlahnya, sehingga durasi dan tempat sosialisasi yang sebatas di perkotaan saja. Pelaksanaan sosialisasi DP3A menggunakan metode ceramah dan tidak memanfaatkan media lainnya untuk mendukung sosialisasi, sehingga sosialisasi menjadi kaku dan membosankan membuat peserta kurang memahami isi materinya. Komunikasi dan koordinasi dalam kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan DP3A masih belum berjalan baik, beberapa kali terjadi pemateri dan peserta hadir. Belum ada ditetapkan standar pengawasan atas kegiatan sosialisasi, tidak ada evaluasi yang dilakukan sehingga tidak dapat dipetakan kelebihan dan kekurangan dari kegiatan sosialis yang telah dijalani tersebut.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Program Kegiatan Sosialisasi. Tindak Kekerasan.

ISLAM RIAU



DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK:

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF SOCIALIZATION ACTIVITIES PROGRAM FOR THE PREVENTION OF VIOLENCE AGAINST WOMEN AND CHILDREN IN WOMEN'S EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION OFFICE DUMAI CITY

By

Kiki Dian Perlina

NPM: 187110386

This study aims to analyze and explain the implementation of the socialization program for acts of violence against women and children at the Dumai City Women's Empowerment and Child Protection Service. This study uses a complementary type of quantitative and qualitative. The research population came from employees at the Dumai City Women's Empowerment and Child Protection Service and people who experienced violence. Sampling by census and simple random sampling with a total of 25 people from the total population. Data collection is done by carrying out observations, distributing questionnaires, and documentation. The data obtained were collected and grouped according to the type of data. Then analyzed based on the explanation and description based on the percentage table. The results of this study found that the implementation of the socialization of the program activities for preventing violence against women and children by the DPPPA of Dumai City as a whole was in the fairly implemented category. These results clearly illustrate that the Dumai City DP3A in carrying out socialization activities with a minimal budget allocation, so that the duration and place of socialization are limited to urban areas. The implementation of the DP3A socialization used the lecture method and did not use other media to support the socialization, so that the socialization became stiff and boring making the participants less understand the content of the material. Communication and coordination in the socialization activities carried out by DP3A still did not go well, several times there were presenters and participants attending. There has not been a set of supervision standards for socialization activities, no evaluation has been carried out so that the advantages and disadvantages of the socialization activities that have been carried out cannot be mapped.

Keywords: Implementation, Socialization Activity Program. Violence.

ISLAM RIAU



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara hukum yang memiliki kewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status hukum penduduknya dan perlindungan tersebut harus mencakup seluruh warga Negara Indonesia baik yang berada didalam negeri maupun yang berada di luar negeri.

Pembangunan sebagai suatu proses dinamis menuju keadaan sosial ekonomi yang lebih baik, atau yang lebih modern, jelas merupakan gejala sosial yang berdimensi banyak dan dapat didekati dari berbagai bidang ilmu pengetahuan, seperti ekonomi pembangunan, sosiologi pembangunan, pembangunan politik, teknologi pembangunan, pembangunan hukum, administrasi pembangunan dan sebagainya.

Cerita mengenai korban tindak kekerasan dikalangan perempuan dan anak memang sedikit sekali ditemukan diberbagai literature yang ada, karena itu jarang terungkap bahwa viktimisasi terhadap perempuan melalui tindak kekerasan diajukan ke pengadilan pidana. Masalahnya mungkin ada depresi masyarakat, baik untuk disembunyikan saja. Ini tentu ada kaitannya dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat yang mengenai kedudukan perempuan selama ini dalam masyarakat.

Dalam kompleks perlindungan HAM, sebagai manusia, perempuan dan anak juga memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya dimuka bumi ini, yakni hak yang dipahami sebagai hak-hak yang melekat secara alamiah sejak ia





dilahirkan, dan tanpa itu manusia (perempuan dan anak) tidak dapat hidup sebagai manusia secara wajar. Dalam pernyataan ini, tampak pernyataan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan rintangan terhadap keberhasilan pembangunan. Bagaimana juga tindak kekerasan akan berdampak pada kurangnya rasa percaya diri, menghambat kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, mengganggu kesehatannya, mengurangi otonomi, baik dibidang ekonomi, politik, sosial budaya serta fisik.

Sebagai suatu kelompok dalam masyarakat didalam suatu Negara merupakan kelompok yang wajib mendapatkan jaminan atas hak-hak yang dimiliki secara asasi. Melalui hukum, hak-hak asasi manusia baik laki-laki maupun perempuan diakui dan dilindungi, karena hukum akan selalu dibutuhkan untuk mengakomodasi adanya komitmen Negara untuk melindungi hak asasi manusia warganya, termasuk perempuan. Perempuan sering kali menjadi korban diskriminasi, pelecehan, dan menjadi obyek kekerasan. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan hukum dalam masyarakat. Upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya memberikan pelayanan melalui upaya-upaya pemberian perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PA) Kota Dumai merupakan salah satu instansi publik yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Instansi publik ini dibentuk



sesuai dengan peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PA) Kota Dumai.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PA) Kota Dumai dibidang Perlindungan Hak Perempuan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas hidup perempuan
- b. Meningkatkan perlindungan hak-hak perempuan
- c. Meningkatkan perlindungan khusus anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PA) Kota Dumai berdasarkan Peraturan Kepala Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang struktur organisasi yang terdiri atas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Ketahanan Keluarga, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak, Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kepala Bidang Data Informasi Gender dan Anak, Kasi-Kasi dan Staff pelaksana.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai memiliki visi dari Walikota dan Wakil Walikota Dumai, yaitu “Terwujudnya masyarakat Dumai yang makmur dan medani pada tahun 2021”.Unsur visi ini terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang berdaya saing yang berarti mengandung makna bahwa



peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan.

Kekerasan dalam pemahaman umum merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka fisik. Namun demikian, kekerasan tidak selalu diidentikkan dengan objek fisik, tetapi tidak sedikit dalam bentuk kekerasan psikis, maupun seksual. Seperti membentak anak, mengintimidasi, memaki-maki, dan berbagai bentuk tindakan lain yang mempengaruhi lemahnya aspek psikis seseorang yang menjadi korbannya. Paling umum diamati terkait korban kekerasan adalah dialami oleh anak dan perempuan. Kedua pihak ini pada tataran hukum sering kali mendapat perlakuan yang diskriminatif, sering mendapat kekerasan dari berbagai pihak, baik didalam ruangan maupun domestic (keluarga/rumah tangga). Perempuan dan anak merupakan objek hukum yang sering mendapatkan perlakuan diskriminatif. Seperti yang ada didalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Yang dimana setiap warga Negara berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

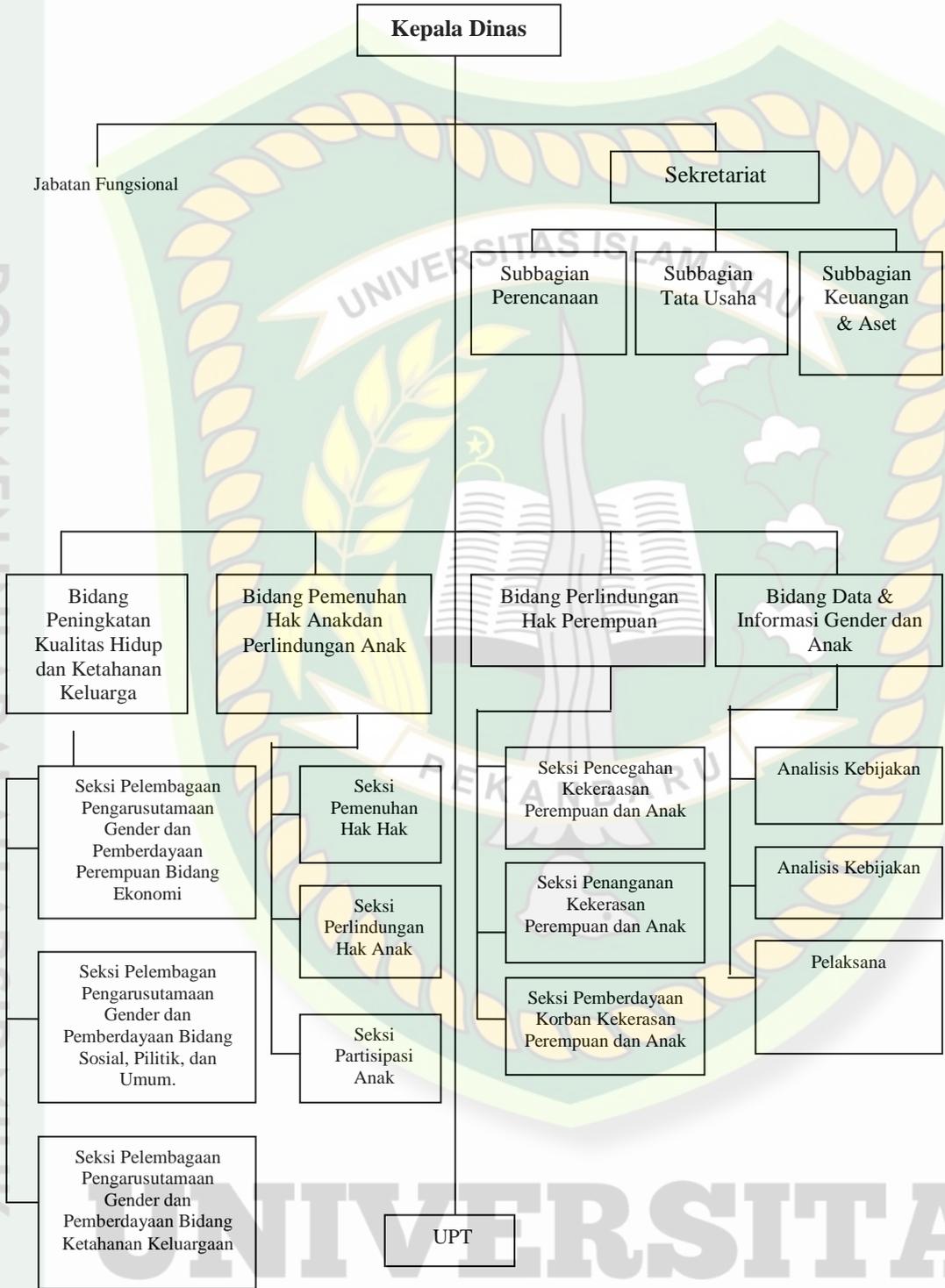
Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya tidak dapat melepaskan diri dari perlunya pembagian kerja yang tepat supaya pegawai bisa melaksanakan tugas-tugas secara efektif. Pengukuran efektivitas kerja yang penulis lakukan didasarkan atas banyaknya tugas tersebut sehingga dari kedua hal tersebut dapat disusun dengan sesuai kebutuhan perusahaan atau organisasi sehingga menghasilkan efektivitas kerja sebagaimana yang diharapkan.



Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin

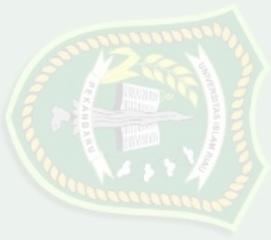
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :
PERPUSTAKAAN SOEMAN HS



Gambar 1.1 Badan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai

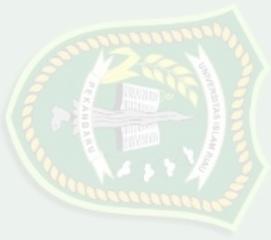
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai



Pentingnya organisasi yaitu kebanyakan orang tidak menyadari sejak ia lahir, dan bekerja sampai matipun mereka diurus oleh suatu organisasi. Orang yang tidak pernah melihat atau menyentuh wujud organisasi secara nyata. Tetapi, umumnya mereka hanya bisa merasakan dari hasil-hasil yang ditimbulkan baik dalam produk atau jasa. Dengan demikian, sebuah organisasi adalah alat yang digunakan oleh orang-orang, baik secara individual maupun kelompok untuk mencapai tujuan (*Gareth R. Jones, 1994:4*)

Setiap organisasi pasti memiliki tujuan, visi, dan misi. Sama halnya dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PA) di Kota Dumai. Tujuan yang sama dalam unit kerja yang lebih kecil, dengan pembagian kerja, dan mekanisme kerja yang jelas. Kinerja suatu organisasi merupakan akumulasi kinerja semua individu yang bekerja di dalamnya. Di sinilah peran sumber daya manusia dibutuhkan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Pegawai yang melaksanakan kinerjanya secara efektif dan efisien hasilnya dapat mempengaruhi peningkatan prestasi kerja organisasi sehingga tujuan organisasi yang telah ditetapkan akan tercapai. Maka kinerja dapat dilihat dari kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PA) Kota Dumai saat melaksanakan serta menjalankan tugasnya yang diukur dengan membandingkan standar dan pelaksanaan kerja dengan hasil yang dicapai dalam menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab pekerjaan.

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU

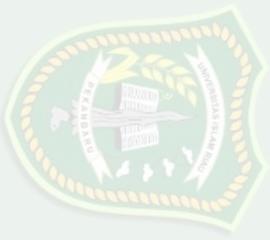


Menurut Vembrato dalam Airlangga (2013:9) menyebut bahwa sosialisasi merupakan sebuah proses belajar, proses akomodasi, dimana sebuah individu menahan, mengubah impuls-impuls dalam dirinya dengan cara mengambil cara hidup atau kebudayaan masyarakat. Dalam sebuah proses sosialisasi sebuah individu mempelajari kebiasaan, sikap, ide, pola, nilai, maupun tingkah laku dalam masyarakat.

DPPPA adalah sebuah lembaga pemerintah yang mengadakan acara sosialisasi tentang kekerasan terhadap perempuan secara rutin setiap tahunnya. Namun acara ini memiliki tingkat keberhasilan yang rendah dikarenakan penggunaan media promosi tidak efektif dan kurang tepat sasaran hingga masyarakat yang datangnya sedikit. Oleh karena itu dibutuhkan perancangan promosi pada acara sosialisasi ini dengan tujuan menarik lebih banyak massa untuk datang ke acara sosialisasi ini.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dalam bidang Seksi Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pencegahan kekerasan perempuan dan anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a. Uraian tugas Seksi Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak sebagaimana pada ayat (1), sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan dibidang pencegahan terhadap perempuan dan anak didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- b. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak didalam rumah tangga, dibidang



ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.

- c. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan dibidang pencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- d. Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penerapan kebijakan dibidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- e. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- f. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan dibidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- g. Menyiapkan penguatan dan pembangunan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dibidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- h. Memantau, menganalisa, mengevaluasi, dan melaporkan penerapan kebijakan dibidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.

ISLAM RIAU



Tabel 1.1 Jumlah Kasus Perempuan Di Kota Dumai Tahun 2021

No	Bulan	Jumlah Keseluruhan Korban	Jumlah Berdasarkan Kasus						KDRT	Total Kasus
			Kekerasan Fisik	Kekerasan Psikis	Kekerasan Seksual	Eksplotasi	Penelantaran	Trafficking		
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	1	1	1	0	0	1	0	1	4
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	1	0	0	0	0	0	0	1	1
6	Juni	1	1	1	0	0	0	0	1	4
7	Juli	2	2	1	1	0	1	0	1	5
8	Agustus	2	0	2	0	0	0	0	2	4
9	September	1	0	0	0	0	0	0	1	1
10	Oktober	4	0	3	1	0	0	0	1	5
11	November	1	0	0	0	0	0	0	1	1
12	Desember	3	2	2	0	0	0	0	3	7
	Jumlah	16	6	10	2	0	2	0	12	32

Sumber : UPTD PPA Kota Dumai

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah kasus perempuan tertinggi pada bulan Desember yaitu 7 kasus, diikuti pada bulan Juli dan Oktober sebanyak 5 kasus. Bulan Februari, Juni, Agustus sebanyak 4 kasus. Kemudian pada bulan Mei, September dan November terdapat 1 kasus, sedangkan pada bulan Januari, Maret, April tidak ada kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Dumai.

Sedangkan kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk perlakuan yang salah baik secara fisik dan/atau emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang berdampak atau berpotensi membahayakan kesehatan anak, perkembangan anak, atau harga diri anak dalam konteks hubungan tanggung jawab. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

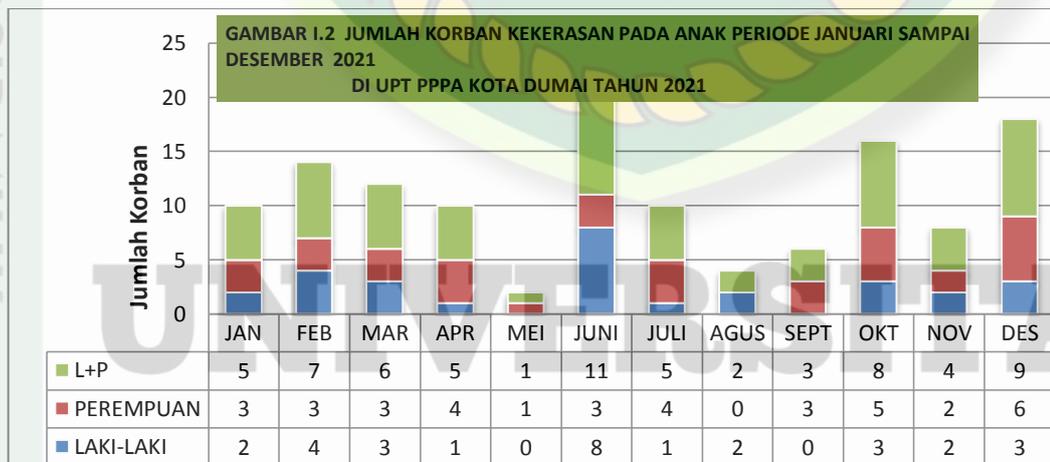


Tabel 1.2 Jumlah Kasus Anak Di Kota Dumai Tahun 2021

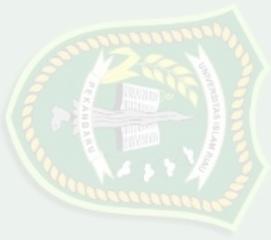
No	Bulan	Jumlah Keseluruhan Korban		Jumlah Berdasarkan Kasus																				
				Kekerasan Fisik		Kekerasan Psikis		Kekerasan Seksual		Eksplotasi		Penantaran		Trafficking (Perdagangan Orang)		ABH		Hak Asuh		KDRT		Total Kasus		
				L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Januari	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3	0	0	2	3	
2	Februari	4	3	1	2	1	2	0	2	0	0	3	1	0	0	0	0	0	3	0	0	8	7	
3	Maret	3	3	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	3	5
4	April	1	4	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	5
5	Mei	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	Juni	8	3	1	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	9	4	
7	Juli	1	4	0	2	0	2	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	1	2	0	1	2	10	
8	Agustus	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	
9	September	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	
10	Oktober	3	5	1	0	1	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	6	
11	November	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2	2	
12	Desember	3	6	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	1	0	2	1	0	0	3	6	
Jumlah		29	37	5	7	3	7	2	17	0	0	5	6	0	0	10	0	9	12	3	3	37	52	
Total		66		12		10		19		0		11		0		10		21		6		89		

Sumber: UPTD PPA Kota Dumai

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah kasus anak tertinggi pada bulan Juli yaitu 10 kasus.



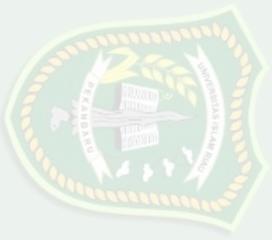
Gambar 1.2 Grafik jumlah Korban Kekerasan pada Anak Periode Januari sampai Desember 2021 di Kota Dumai



Pada Gambar 1.2 terlihat jumlah anak korban kekerasan dari Bulan Januari hingga Bulan Desember 2021 jumlah korban yang tertinggi terjadi di Bulan Juni yaitu 11 anak dan yang terendah pada Bulan Mei yaitu 1 anak. Sedangkan jumlah korban kekerasan pada anak periode Januari sampai Desember 2021 adalah **66 anak**. Apabila dilihat dari jenis kelamin jumlah anak perempuan yang menjadi korban kekerasan selalu lebih banyak dibandingkan dengan anak laki-laki. Pada tahun 2021 tercatat dari 66 anak yang menjadi korban kekerasan, sebanyak 37 anak (56 persen) adalah anak perempuan dan 29 anak (44 persen) adalah anak laki-laki.

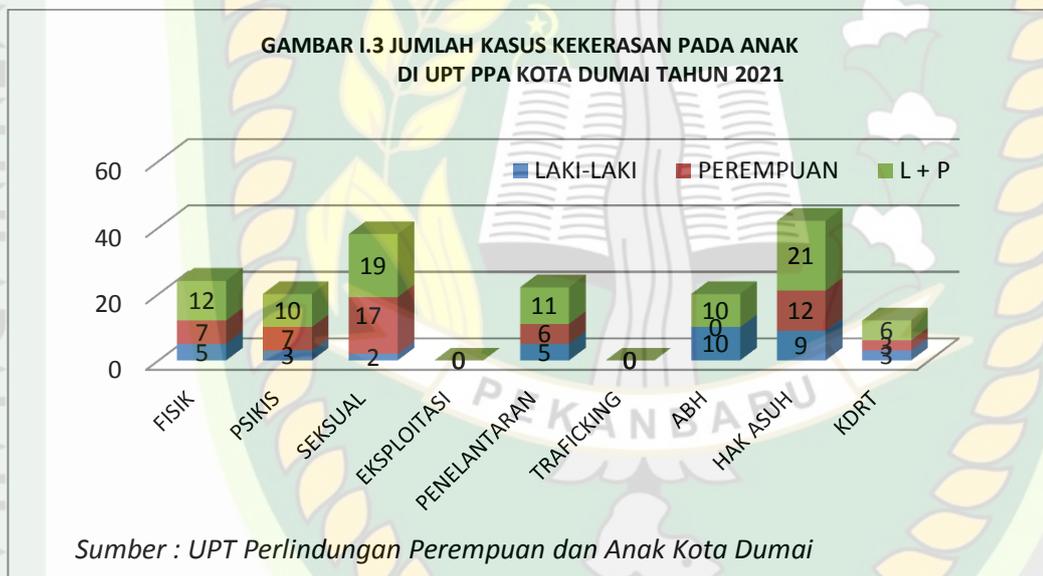
Lebih tingginya jumlah anak perempuan yang menjadi korban kekerasan dapat disebabkan oleh tidak terlaporkannya kasus yang dialami oleh anak laki-laki seperti kasus kekerasan seksual yang banyak juga dialami oleh anak laki-laki.

Rumah tidak selalu menjadi tempat yang aman bagi anak-anak. Pada kenyataannya terdapat situasi dimana orang dewasa terutama wanita dan anak-anak mengalami kekerasan di dalam rumah. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan semua perlakuan baik disengaja maupun tidak yang dapat menyakiti/mengganggu kesejahteraan anak baik secara fisik maupun psikologis. Kekerasan tidak hanya dapat dilakukan oleh ayah namun juga dilakukan oleh ibu. Beberapa bentuk kekerasan terhadap anak yang sering terjadi yaitu kekerasan fisik berupa kebiasaan ibu untuk mendisiplinkan anak dengan memberikan hukuman berupa cubitan, pukulan, tamparan, mengurung anak di kamar mandi dll; kekerasan psikologis berupa pengucapan katakata kasar terhadap anak, memanggil anak dengan panggilan yang buruk, dan pengabaian anak;



kekerasan secara ekonomi seperti tidak memberikan uang jajan pada anak dan secara sengaja tidak memenuhi kebutuhan dasar anak.

Jika dilihat dari jenis kasus yang dialami korban kekerasan pada anak pada tahun 2021 adalah sebanyak **89 kasus**. Kasus yang tertinggi adalah pada kasus hak asuh anak yaitu 21 kasus atau sebanyak 23 persen dan diikuti dengan kasus kekerasan seksual pada anak yaitu 19 kasus atau sebanyak 21 persen, terlihat di gambar 1.3.



Gambar 1.3 Grafik Jumlah Kasus Kekerasan pada Anak Periode Januari sampai Desember 2021 di Kota Dumai

Kasus kekerasan seringkali tidak dilaporkan atau tertunda pelaporannya karena berbagai penyebab, sehingga menjadi kendala dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Beberapa alasan tertunda atau tidak laporannya kasus kekerasan terhadap anak antara lain: a) korban merasa malu untuk membuka masalah rumah tangga kepada pihak lain; b) korban menarik pengaduan untuk menyelesaikan masalah secara keluarga; Jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban di Indonesia tertuang dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006



tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Adanya jaminan tersebut diharapkan dapat mendorong korban dan/atau saksi lebih berani untuk melapor pada aparat penegak hukum ketika mengalami atau menemui kasus kekerasan.

Untuk mengantisipasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka pemerintah melalui Dinas terkait melaksanakan program kegiatan sebagai bentuk upaya mengantisipasi kasus kekerasan dengan melakukan sosialisasi sebagai berikut:

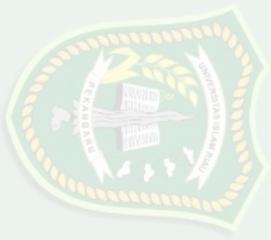
Tabel 1.1 Program Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Bidang Perlindungan Hak Perempuan

No	Kegiatan atau Program Kerja	Tempat	Sasaran	Capaian atau Indikator Tujuan dan Sasaran	Anggaran
1.	Sosialisasi kekerasan perempuan dan anak dikelurahan di Kota Dumai.	20 Kelurahan	20 Kelurahan	Cakupan publikasi dan informasi tentang perlindungan perempuan dan anak Kota Dumai.	Rp. 15.000.000

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021

Namun berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan masih ditemukan masalah dalam Kinerja Organisasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Dumai, antara lain:

1. Belum efektifnya pelaksanaan program kegiatan pada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak seperti kegiatan pemberdayaan perempuan, pencegahan serta penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dalam pelaksanaannya membutuhkan tenaga-

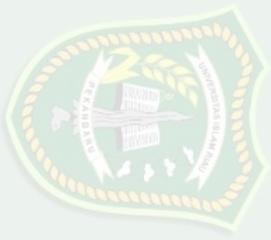


tenaga ahli dan professional dibidang seperti Psikolog, Psikiater, dan tenaga ahli lainnya.

2. Masih adanya kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Dumai tahun 2021, serta belum efektifnya peran lembaga perlindungan hak perempuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai dari upaya perlindungan hak-hak perempuan, hal ini ditunjukkan dari rendahnya penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Istilah kekerasan dalam bahasa Indonesia berarti hal yang bersifat memaksa, tidak mengenal belas kasihan, tidak lemah lembut, atau tindakan yang bersifat memaksa, atau bisa juga berarti sifat yang kerat atau paksaan. Dapat dipahami bahwa kekerasan merupakan tindakan baik berupa lisan maupun perbuatan yang dapat menyakiti seseorang sebagai korbannya. Dalam konteks tulisan ini, objek kekerasan yang dimaksud adalah perempuan dan anak dalam sebuah keluarga. Dengan demikian, maksud kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan suatu tindakan yang dilakukan terhadap perempuan dan anak dalam konteks keluarga, baik berupa kekerasan fisik, psikis, ekonomi, maupun kekerasan seksual.

Korban kekerasan sebagian besar memerlukan pendamping yang bisa mengerti dan melindungi serta mampu membantu mereka dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Sehubungan dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk lebih jauh mengenal berikut menganalisa penanganan dalam mencegah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dengan judul :



“Pelaksanaan Program Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis menentukan perumusan masalah dalam penelitian ini, yakni “Bagaimana Pelaksanaan Program Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai”.

1.3 Tujuan Penelitian

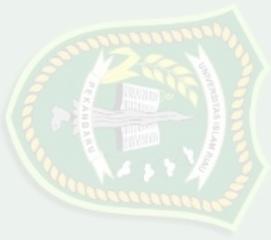
Apapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah: Untuk menganalisis dan menjelaskan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dalam mencegah tindak kekerasan pada perempuan dan anak.

1.4 Manfaat Penelitian

Dapat diketahuinya gambaran masalah dan tujuan penelitian diatas maka manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis penulis berharap agar penelitian ini menjadi ilmu pengetahuan dan menambah keilmuan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak.



- b. Sebagai bahan acuan untuk pengembangan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian penulis.

1.4.2 Manfaat Akademis

Diharapkan bermanfaat untuk literatur sumber bacaan dan pengutipan untuk penelitian lanjutan peneliti dan penelitian selanjutnya.

1.4.3 Manfaat Praktis

- a. Menjadi sarana informasi terkait Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Memberikan informasi kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai untuk membantu kinerja internal maupun eksternal dalam bidang pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- c. Menjadi pengetahuan bagi masyarakat untuk lebih terbuka terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak dan bagaimana pencegahan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

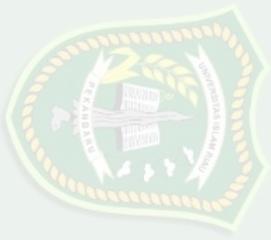
2.1 Studi Kepustakaan

2.1.1 Konsep dan Teori Administrasi Publik

Administrasi sebagai ilmu pengetahuan termasuk kelompok “Applied sciences” karena kemanfaatannya hanya ada apabila: konsep, prinsip-prinsip, rumus-rumus, dalil-dalil, metodologi, lokus, fokusnya, atau obyeknya yang jelas dikembangkan dan diterapkan secara terus menerus untuk meningkatkan mutu berbagai kehidupan manusia termasuk berbagai bangsa dan bernegara. Administrasi sebagai suatu seni (Art) atau administrasi dalam praktek zaman modern sekarang ini merupakan proses kegiatan yang perlu dikembangkan secara terus menerus agar administrasi sebagai suatu sarana untuk mencapai tujuan benar-benar dapat memegang peran yang diharapkan.

Menurut Henry Fayol, Administrasi merupakan bagian kegiatan dalam badan usaha. Badan usaha itu merupakan yang melaksanakan kearah suatu sasaran atau tujuan (obyektif) dengan usaha mendapatkan keuntungan yang optimum dari semua sumber-sumber yang tersedia. Untuk melaksanakan maksud tersebut diperlukan pekerjaan yang lancar dengan menerapkan 6 fungsi utama, dimana administrasi hanyalah sebagai salah satu dari fungsi kegiatan. Henry Fayol mendefinisian fungsi administrasi menjadi 5 yaitu:

1. Perencanaan (Planning)
2. Pengorganisasian (Organizing/Organisation)



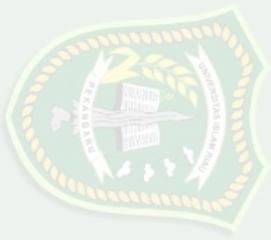
3. Pemberian Komando (Commanding/Commandement)
4. Pengkoordinasian (Coordinating/Coordination)
5. Pengawasan (Controlling)

Ada beberapa para ahli menyebutkan pengertian administrasi, menurut Siagian (2014; 2) administrasi merupakan keseluruhan aktivitas kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan.

Administrasi merupakan proses yang ada pada setiap kelompok, seperti yang dijelaskan oleh Leonard B. White (dalam Syafie 2014; 4) bahwa administrasi adalah suatu proses umum pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik ukuran besar maupun kecil.

Administrasi merupakan sebuah rangkaian kegiatan penataan oleh sejumlah orang dalam mencapai tujuan, yang disebutkan oleh Gie (dalam Zulkifli dan Moris 2014;14) administrasi merupakan segenap rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. Pekerjaan pokok tersebut mencakup unsur-unsur umum administrasi dalam perspektif proses.

Mengacu kepada perspektif jasa pelayanan sebagai produk suatu lembaga, konsep administrasi diartikan sebagai proses kegiatan yang menghasilkan sejumlah keterangan tertulis yang dibutuhkan oleh suatu kelompok orang tertentu. Jadi dapat disimpulkan administrasi adalah keluruhan proses kerjasama



antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati bersama sesuai pembagian tugas dan fungsi kerjanya masing-masing.

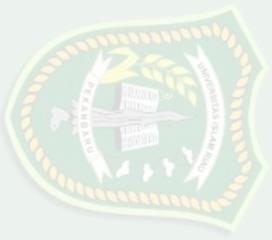
Sedangkan administrasi publik pun sangat berperan penting dalam proses pelaksanaan tujuan Negara. Ada beberapa para ahli yang menggunakan definisi administrasi publik. administrasi publik juga disebut sebagai administrasi Negara atau administrasi pemerintahan.

Administrasi publik yang diungkapkan R.C. Chandler dan J.C Plano (dalam Indraadi, 2006;114) adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Selain itu, Nicolas Henry (dalam Indradi, 2006;116) mengatakan bahwa administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsive terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha mengembangkan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah suatu proses pelaksanaan atau implementasi dari aktivitas pemerintah yang berhubungan erat dengan fungsi manajemen dengan mempertimbangkan nilai efektivitas dan efisiensi dalam rangka mencapai tujuan yang dikehendaki.

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU



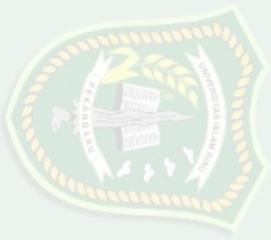
2.1.2 Konsep dan Teori Organisasi Publik

Organisasi merupakan unsur utama bagi sekelompok orang yang bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu karena organisasi sebagai wadah atau tempat berlangsungnya berbagai macam aktivitas-aktivitas dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah disepakati tadi. Menurut Zulkifli (2015; 99) pengorganisasian merupakan proses penyusunan anggota dalam bentuk struktur organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang melingkupinya dengan baik intern maupun ekstern. Dua aspek utama dalam organisasi yaitu departementasi dan pembagian kerja yang merupakan dasar proses pengorganisasian.

Organisasi biasanya ditegakkan pada landasan mekanisme administrative. Staf administratif bertanggung jawab terhadap pemeliharaan organisasi dan mengkoordinasikan kegiatan organisasi.

The Liang Gie (dalam Kaho, 1989;185) melihat organisasi dari segi strukturnya, organisasi dapat dirumuskan sebagai susunan yang terdiri dari satuan organisasi secara segenap pejabat, kekuasaan, tugas, dan hubungan satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dan menurut Marimun (1975;3) menyimpulkan unsur-unsur organisasi sebagai berikut:

1. Adanya sekelompok orang yang mempunyai
2. Tujuan bersama, hanya dapat diselenggarakan dnegan
3. Kerjasama atau usaha antara anggota kelompok, supaya kerjasama berjalan dengan baik, teratur, maka diadakanlah
4. Pembagian kerja dibawah



5. Suatu pimpinan.

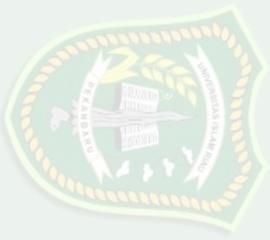
Organisasi merupakan proses untuk merancang struktur formal yang mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas diantara para anggota untuk mencapai tujuan. Jadi organisasi dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Organisasi dalam arti badan yaitu sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.
- b. Organisasi dalam arti bagan yaitu gambaran skematis tentang hubungan kerjasama dari orang-orang yang terlibat dalam organisasi untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Siagian (2014; 6) organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama serja secara otomatis terkait dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Organisasi memiliki beberapa prinsi yang sejelas, menurut Siagian (2014; 169-172) ada sejumlah prinsip organisasi yaitu sebagai berikut:

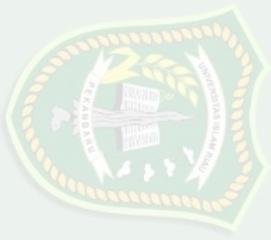
- a. Kejelasan tujuan, siapapun akan mengakui bahwa suatu organisasi termasuk Negara didirikan untuk mencapai tujuan tertentu.
- b. Kejelasan misi, yang merupakan langkah-langkah utama yang harus diemban dalam rangka pencapaian tujuan.
- c. Fungsionalisasi, yang menunjukkan bahwa organisasi pemerintah merupakan organisasi yang besar.



- d. Pembagian tugas, karena banyaknya fungsi yang harus diselenggarakan oleh pemerintah dengan sejumlah jajarannya.
- e. Departementalisasi, sejumlah tugas yang harus dilaksanakan atau dijalankan yang dikelompokkan dalam departemen.
- f. Keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab.
- g. Kesatuan arah, segala sesuatu yang kemudian terjadi dalam organisasi harus diarahkan dalam pencapaian tujuan.
- h. Kesatuan komando, yaitu seorang pelaksana tugas hanya menerima perintah dari satu sumber.
- i. Kejelasan kebijaksanaan tentang pola pengambilan keputusan, yaitu terdapat dua pola pengambilan keputusan, yaitu pola sentralisasi dan desentralisasi.
- j. Rentang kendali, yaitu dengan motivasi yang kuat, loyalitas yang dapat dikendalikan, disiplin kerja yang tinggi, rasa tanggung jawab yang besar, dedikasi dan rasa pengabdian yang mendalam sekalipun, serta pengawasan tetap diperlukan.

Organisasi merupakan koordinasi yang rasional oleh sejumlah orang dalam mencapai tujuan, Sehein (dalam Priansa 2013;60-61) mengungkapkan bahwa organisasi merupakan koordinasi yang bersifat rasional yang dilakukan oleh sejumlah orang demi mencapai sejumlah tujuan yang jelas, lewat pembagian kerja atau fungsi, dan lewat suatu hirarki otoritas dan pertanggungjawaban.

Organisasi juga suatu hubungan terstruktur dalam menjalankan suatu fungsi tertentu, seperti yang dikatakan Weber (dalam Thoah 2008;166) organisasi



merupakan suatu kerangka hubungan yang terstruktur yang didalamnya berisi wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan suatu fungsi tertentu.

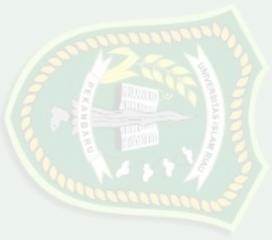
Jadi, dapat disimpulkan bahwa organisasi itu adalah tempat atau wadah untuk melaksanakan suatu kerjasama sekelompok orang dalam mencapai suatu tujuan yang telah disepakati sebelumnya.

Sedangkan organisasi publik menurut Stephen P. Robbins (dalam Fahmi, 2013:2), merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Pengertian organisasi publik berkenaan dengan proses pengorganisasian.

Menurut Fahmi (2013:1) organisasi publik merupakan sebuah wadah yang memiliki multi peran dan didirikan dengan tujuan mampu memberikan serta mewujudkan keinginan berbagai pihak dan tidak terkecuali kepuasan bagi pemiliknya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi publik adalah salah satu wadah yang menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang didalam penyelenggaraan pelayanan publik, dilandasi dengan pengaturan hukum yang mendukungnya.

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU



2.1.3 Konsep dan Teori Manajemen Publik

Henry Fayol mengungkapkan bahwa manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan metode efektif dan efisien.

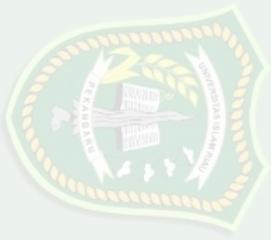
Dalam pengertian umum menurut (Handoko, 1986;8) manajemen adalah suatu seni, keterampilan, atau keahlian, yakni seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Atau menurut (Heidjrachman,1987;39) keahlian untuk menggerakkan orang untuk melakukan pekerjaan. Dalam rumusan lain (Handoko, 1986;2) manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Menurut Shoner, et. Al (dalam Zulkifli 2005;28) mengatakan manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen itu segala kegiatan dengan melalui orang lain untuk mencapai tujuan tertentu serta dilaksanakan berurutan berjalan kearah tujuan.

Dalam menggerakkan organisasi, seorang pemimpin harus menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, dimana menurut Terry dan Lestie. W Rue (2000;9) adalah sebagai berikut:

1. Planning (Perencanaan)



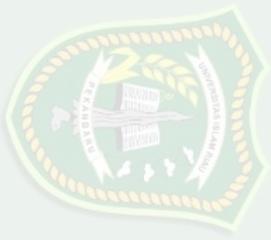
2. Organizing (Organisasi)
3. Staffing (Kepegawaian)
4. Motivating (Motivasi)
5. Controlling (Pengawasan)

Sedangkan menurut The Liang Gie (dalam Zulkifli, 2005;28) fungsi manajemen adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan
2. Pembuatan keputusan
3. Pengarahan
4. Pengorganisasian
5. Pengawasan
6. Penyempurnaan

Dapat dipahami, manajemen memiliki arti penting bagi setiap kegiatan yang dilakukan. Diperlukan kecakapan dan keterampilan dari mereka yang dapat merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, serta mengawasi kegiatan-kegiatan organisasi sehingga tercapainya tujuan organisasi yang diharapkan secara efektif dan efisien, karena manajemen mencakup berbagai kegiatan yang dapat dioperasionalkan didalam organisasi.

Menurut Terry (dalam Hamim, 2005;16) menyatakan manajemen adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan Planning, Organizing, Actuating, Controlling, dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan yang diikuti secara berurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.



Menurut Andrew (dalam Marnis, 2011;3) manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktifitas-aktifitas perencanaan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

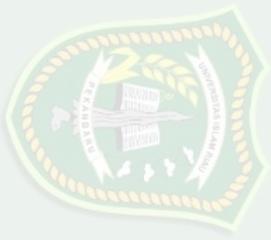
Gullick (dalam Wijayanti, 2008;1) mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (science) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan.

Sedangkan manajemen publik Menurut Nor Ghofur (2014) mengartikan bahwa manajemen publik adalah manajemen pemerintah, yang artinya manajemen publik juga bermaksud untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Manajemen Publik Menurut Shafritz dan Russel (dalam Kebab, 2008:93) diartikan sebagai upaya seseorang untuk bertanggungjawab dalam menjalankan suatu organisasi, dan pemanfaatan sumber daya (orang dan mesin) guna mencapai tujuan organisasi. Menurut Donovan dan Jackson (2013:11-12) manajemen publik diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan dengan serangkaian keterampilan (skill).

2.1.4 Konsep dan Teori Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah proses dimana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur (Sufian Hamim, 2013). Proses tersebut mungkin meliputi perubahan



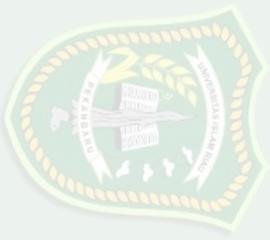
budaya secara menyeluruh, struktur dan atau sistem manajemen dari organisasi secara keseluruhan. Kecuali ketika diperlukan perubahan secara drastis pada perusahaan, manajer level menengah dan bawah akan mengimplementasikan strateginya secara khusus dengan pertimbangan dari manajemen puncak. Kadang-kadang dirujuk sebagai perencana operasional, implementasi strategi sering melibatkan keputusan sehari-hari dalam alokasi sumber daya.

Implementasi atau pelaksanaan merupakan aktivitas atau segala usaha-usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan ditangani segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dimulai dan bagaimana cara yang harus dilakukan.

Abdullah (1987;5) mengatakan implementasi atau pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan. Bahwa implementasi atau pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Edward, yang dikutip oleh Abdullah (1987;40), selain itu perlu adanya batasan waktu dan penentuan tata pelaksanaan. Berhasil tidaknya proses implementasi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang merupakan syarat terpenting mencapai keberhasilan dalam proses implementasi. Adapun faktor-faktor tersebut, sebagai berikut:

1. Komunikasi, yang merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana, hal ini



menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi yang disampaikan.

2. Resources (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staff dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan berguna untuk pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan pelaksana.
3. Disposisi, sikap komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program.
4. Struktur birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures) yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam pencapaian hasil yang memuaskan, karena penyelesaian masalah-masalah akan memerlukan penanganan dan penyelesaian khusus tanpa pola baku.

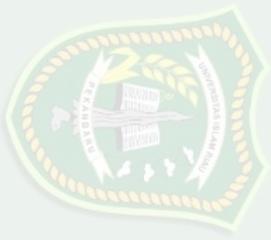
Keempat faktor diatas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor yang satu dengan faktor lainnya.

Abdullah (1987;398) selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak, yaitu:

- Adanya suatu program atau kebijakan yang dilaksanakan
- Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran manfaat dari program

perubahan dan peningkatan.

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU



- Unsur pelaksana baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut

Dari pendapat diatas dapatlah dikatakan bahwa suatu pelaksana suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut.

Pelaksanaan sering dijumpai dalam proses administrasi, The Liang Gie et, al (dalam Adisasmito, 2011;24) mengatakan pelaksanaan adalah salah satu kegiatan yang dapat dijumpai dalam proses administrasi. Lebih lanjut Bintoro Tjokroadmudjoyo mengemukakan pelaksanaan sebagai proses dapat dipahami dalam bentuk suatu rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program atau proyek.

Pelaksanaan juga disebut dengan penggerakan, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (dalam Administrasi, 2011;24) merumuskan pengertian pelaksanaan atau penggerakan sebagai upaya agar tiap pegawai atau tiap pegawai ataupun tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Menurut Westra, dkk (didalam Adisasmita, 2011;24) Pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan dan ditetapkan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaan dan kapan waktunya.

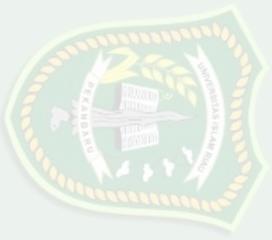


Menurut Terry (2002;23) pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan suatu anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran.

Hamim (2013) mengatakan pelaksanaan yakni:a. Rumusan rencana kegiatan merupakan kejelasan yang ditetapkan instansi terkait dalam melaksanakan program kegiatan yang telah diagendakan. Kejelasan tersebut terdiri dari adanya tujuan, pelaksana dan sasaran, tempat dan waktu, alokasi anggaran, dan metode pelaksanaan.b. Pelaksanaan kegiatan merupakan aktivitas kegiatan program yang dijalani berdasarkan struktur yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari struktur dan tupoksi tim, kepemimpinan tim, komunikasi tim, dan koordinasi tim. Dan c. Pengawasan atau pengendalian kegiatan merupakan langkah yang dilakukan untuk mengontrol kegiatan atas program yang dilaksanakan melalui rencana pengawasan, pelaporan, evaluasi, dan koreksi atas penyimpangan.

Dengan demikian pada penelitian ini, peneliti menetapkan pendapat Hamim (2013) sebagai indikator penelitian dengan merumuskannya sebagai berikut: 1) Rumusan rencana kegiatan, 2) Pelaksanaan kegiatan, dan 3) Pengawasan atau pengendalian kegiatan.

Pelaksanaan merupakan salah satu fungsi manajemen dan berhubungan langsung dengan unsur manusia dan pegawai yang melaksanakan suatu aktivitas dalam organisasi tersebut. Sebagai unsur yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan, dipimpin dituntut memiliki kemampuan serta keahlian untuk melaksanakan serta menjalankan tugasnya secara baik.



2.1.5 Konsep dan Teori Sosialisasi

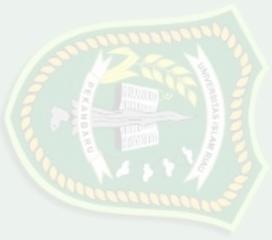
Sosialisasi melingkupi pemeriksaan tentang lingkungan kultural lingkungan sosial dari masyarakat yang bersangkutan, interaksi sosial dan tingkah laku sosial. Berdasarkan tersebut, sosialisasi adalah mata rantai yang paling penting di antara sistem sosial yang lainnya, karena dalam sosialisasi adanya kontribusi individu-individu dengan kelompok-kelompok dalam satu sistem untuk berpartisipasi.

Pengertian sosialisasi menurut Charles R. Wright adalah “Proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan sampai tingkat tertentu norma-norma sosialnya, sehingga membimbing orang tersebut untuk memperhitungkan harapan-harapan orang lain”

Sosialisasi bila dikaitkan dengan prosesnya, terdapat jenis-jenis sosialisasi. Berikut Menurut Peter L Berger dan Luckman terdapat 2 jenis sosialisasi :

- Sosialisasi primer, sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat atau keluarga. Sosialisasi ini terjadi pada saat kanak-kanak.
- Sosialisasi sekunder, yaitu suatu proses sosialisasi lanjutan dari sosialisai primer yang memperkenalkan individu dalam kelompok tertentu dalam masyarakat

Kedua proses tersebut berlangsung dalam institusi total, yaitu tempat tinggal dan tempat kerja. Dalam kedua institusi tersebut, terdapat sejumlah individu dalam situasi yang sama, terpisah dari masyarakat luas dalam jangka



waktu tertentu, bersama-sama menjalani proses kehidupan dan diatur secara formal

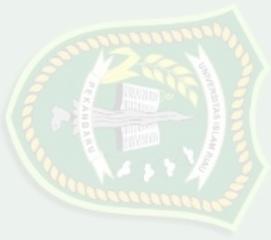
Menurut Gunawan (2012:198), sosialisasi merupakan proses penyampaian sesuatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau mengubah sikap, pendapat, perilaku baik langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan pendapat di atas jelaslah bahwa sosialisasi merupakan proses penyampaian suatu pesan kepada orang lain yang dilaksanakan oleh seseorang atau sekompok orang untuk memberitahu, mengingatkan, dan mengubah pandangan atau perilaku seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sedangkan tujuan sosialisasi menurut Agustin (2014), antara lain:

- 1) Memberi keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melangsungkan kehidupan seseorang kelak ditengah-tengah masyarakat.
- 2) Menambah kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien serta mengembangkan kemampuan membaca, menulis, dan bercerita.
- 3) Membantu pengendalian fungsi-fungsi organik melalui pelatihan mawas diri yang tepat.
- 4) Membiasakan individu dengan nilai-nilai kepercayaan yang ada di masyarakat.

Dari tujuan tersebut, maka fungsi sosialisasi Menurut Ibeng (2020) dapat dibagi menjadi dua macam yaitu dari segi kepentingan individu dan dari segi kepentingan masyarakat. Dari segi kepentingan individu sosialisasi berfungsi



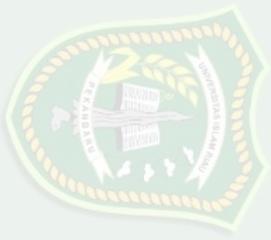
supaya seorang individu dapat mengenal, mengakui serta menyesuaikan dirinya dengan nilai, norma dan struktur sosial yang terdapat dalam masyarakat. Dari segi kepentingan masyarakat sosialisasi berfungsi sebagai alat dalam pelestarian, penyebarluasan serta mewarisi nilai, norma, maupun kepercayaan yang terdapat di dalam masyarakat. Menurut Guanawan (2012:198), fungsi sosialisasi yaitu untuk menginformasikan, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi.

Dengan demikian jelaslah bahwa sosialisasi merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mengubah arah pandang atau perilaku seseorang melalui berbagai cara untuk bisa merangkul sasaran atau tujuan yang menjadi sasaran pencapaian dari kegiatan sosialisasi.

2.1.6. Konsep Kekerasan

Kekerasan atau dalam bahasa Inggris: *violence* berasal dari bahasa Latin: *violentus* yang berasal dari kata *vī* atau *vīs* berarti kekuasaan atau berkuasa. Dalam bahasa sehari-hari konsep kekerasan meliputi pengertian yang sangat luas mulai dari tindakan penghancuran harta benda, pemerkosaan, pemukulan, perusakan yang bersifat ritual, penyiksaan dan bahkan sampai pada pembunuhan. Menurut asal katanya, kekerasan (*violence*) berasal dari gabungan kata latin yakni *vis* dan *latus*. *Vis* berarti daya dan kekuatan, sedangkan *latus* berarti membawa. Jadi secara sosiologis, kekerasan merupakan konflik sosial yang tidak terkendali oleh masyarakat dengan mengabaikan norma dan nilai sosial sehingga menimbulkan tindakan merusak.

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang bersifat terbuka (*overt*) maupun yang sifatnya tertutup (*covert*) dan baik yang

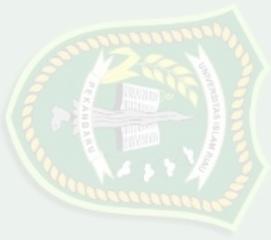


bersifat menyerang (*offensive*) ataupun bertahan (*deffensive*) yang disertai dengan penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh karena itu, ada empat jenis kekerasan yang dapat diidentifikasi antara lain :

- a. Kekerasan terbuka adalah kekerasan yang dapat dilihat seperti perkelahian,
- b. Kekerasan tertutup yakni kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung seperti perilaku mengancam,
- c. Kekerasan agresif adalah kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan tetapi untuk mendapatkan sesuatu seperti pemerkosaan, dan
- d. Kekerasan defensif adalah kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri.

Definisi mengenai kekerasan menurut Soetandyo dalam Mufida (2004:145) adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat (atau yang tengah merasa kuat) terhadap seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lebih lemah, baik berbentuk fisik maupun non fisik yang superior dengan kesengajaan untuk menimbulkan rasa derita pada pihak yang tengah menjadi objek kekerasan.

Definisi lain mengenai kekerasan dikemukakan oleh Galtung secara komprehensif, Galtung berpendapat bahwa kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada dibawah realisasi potensialnya. Kekerasan disini didefinisikan sebagai penyebab perbedaan antara yang potensial dan yang aktual, disatu pihak manusia mempunyai potensi yang masih ada di dalam dan dilain pihak potensi menuntut

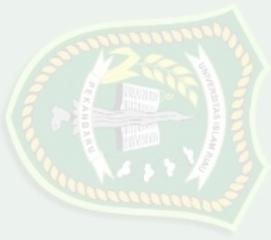


untuk diaktualkan yaitu dengan merealisasikan dan memperkembangkan diri dan dunianya dengan nilai-nilai yang dipegangnya (Santoso, 2002;168).

Selanjutnya Galtung juga menguraikan enam dimensi penting dari kekerasan yakni :

- a. Kekerasan fisik dan psikologis. Dalam kekerasan fisik, tubuh manusia disakiti secara jasmani bahkan sampai pada pembunuhan, sedangkan kekerasan psikologis adalah tekanan yang dimaksudkan meredusir kemampuan mental atau otak.
- b. Kekerasan positif atau negatif. Sistem orientasi imbalan (*reward oriented*) yang sebenarnya terdapat pengendalian, tidak bebas, kurang terbuka dan cenderung manipulatif meskipun memberikan kenikmatan dan euphoria.
- c. Ada objek atau tidak. Dalam tindakan tertentu tetap ada ancaman kekerasan fisik dan psikologis meskipun tidak memakan korban tetapi membatasi tindakan manusia.
- d. Ada subjek atau tidak. Kekerasan disebut langsung atau personal jika ada pelakunya dan bila tidak ada pelakunya disebut struktural atau tidak langsung.
- e. Disengaja atau tidak. Bertitik berat pada akibat dan bukan tujuan, pemahaman yang hanya menekankan unsur sengaja tentu tidak cukup untuk melihat serta mengatasi kekerasan struktural yang bekerja secara halus dan tidak disengaja. Dari sudut korban, sengaja atau tidak, kekerasan tetaplah kekerasan.

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU

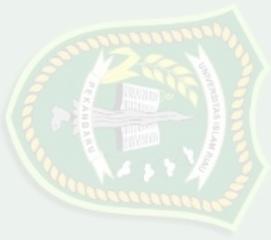


f. Yang tampak dan tersembunyi. Kekerasan yang tampak secara nyata baik yang personal maupun struktural dapat dilihat meski secara tidak langsung sedangkan kekerasan tersembunyi adalah sesuatu yang memang tidak kelihatan (*latent*) tetapi bisa dengan mudah meledak. Kekerasan tersembunyi akan terjadi jika situasi menjadi begitu tidak stabil sehingga tingkat realisasi aktual dapat menurun dengan mudah.

Kekerasan dapat digolongkan sebagai suatu kekerasan yang harus memuat atau menunjuk unsur-unsur tertentu, seperti tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, adanya ancaman atau tindakan nyata dan memiliki akibat kerusakan terhadap harta benda, fisik atau mengakibatkan kematian.

Galtung (1992:64) juga memberikan pengertian dalam arti yang sangat luas meliputi semua bentuk tindakan yang dapat menghalangi seseorang untuk merealisasikan potensi dirinya *self-realization* dan mengembangkan pribadinya *personal growth*. Menurut Camara (2000:19) yang mengenalkan teori-teori kekerasan spiral *spiral of violence* yang menggambarkan proses dari bekerjanya tiga bentuk kekerasan yang bersifat personal, institusional, dan struktural yaitu ketidakadilan, kekerasan pemberontakan sipil dan represi Negara. Ketiganya saling terkait satu sama lain, artinya kemunculan kekerasan satu menyebabkan kemunculan kekerasan lainnya.

Ketiga bentuk kekerasan itu yang paling mendasar dan menjadi sumber utama adalah ketidakadilan, yaitu kekerasan nomor satu sebagai gejala yang menimpa baik perseorangan, kelompok, maupun Negara, yang diakibatkan oleh bekerjanya ketidakadilan sosial dan kepentingan ekonomi internasional.



Ketidakadilan ini terjadi sebagai akibat dari upaya kelompok elit nasional mempertahankan kepentingan mereka sehingga terpelihara sebuah struktur yang mendorong terbentuknya kondisi *sub-human* yaitu kondisi hidup di bawah standar layak untuk hidup sebagai manusia normal.

Menurut teori Camara (2000:13) ini, kondisi *sub-human* ini selanjutnya menciptakan keterangan terus menerus di masyarakat, sehingga mendorong munculnya kekerasan nomor dua yaitu pemberontakan di kalangan sipil. Dalam kondisi ini manusia menderita tekanan, alisiensi, dehumanisasi martabat, kemudian mendorong mereka, naik yang langsung menderita tekanan struktural itu maupun anak-anak muda yang sudah tidak tahan lagi dengan kondisi sumpek *sub-human* itu, melakukan pemberontakan dan protes di jalan-jalan untuk melawan ketidakadilan. Ketika konflik, protes dan pemberontakan muncul di jalan-jalan, ketika kekerasan nomor dua mencoba melawan kekerasan nomor satu, penguasa memandang dirinya berkewajiban memelihara ketertiban, meski harus dengan menggunakan cara-cara kekerasan, sehingga muncul kekerasan nomor tiga yaitu represi penguasa.

Bekerjanya tiga jenis kekerasan itu menyerupai spiral, karenanya Camara (2000:14) menyebutkannya dengan spiral kekerasan. Kekerasan nomor satu atau ketidakadilan mendorong pemberontakan sipil atau kekerasan nomor dua selanjutnya hal itu mengundang hadirnya represi Negara atau kekerasan nomor tiga. Ketika represi itu diberlakukan, hal itu selanjutnya memperparah kondisi ketidakadilan, kekerasan nomor satu sehingga terbentuklah spiral kekerasan (kekerasan menimbulkan kekerasan lainnya).



Kejahatan kekerasan suatu problema yang senantiasa muncul di tengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut muncul dan berkembang dan membawa akibat tersendiri sepanjang masa.

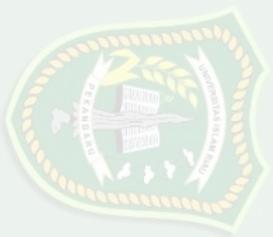
2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memahami dan memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang sedang penulis lakukan. Dari penelitian terdahulu yang disusun penulis, tidak ditemukannya penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Selain judul, penulis juga kesulitan menemukan topik penelitian skripsi atau jurnal yang memiliki kesamaan pembahasan yang sedang penulis tulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.

Berikut ini merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa penelitian skripsi dan jurnal yang memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan penulis serta mencari acuan dalam penelitian ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Kesimpulan
1	2	3	4
1.	Susanto Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang, 2006	Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Pendekatan Sosial Keagamaan (studi dipusat perlindungan perempuan dan anak (P3A) Kabupaten Sidoarjo)	Penelitian yang dilakukan Susanto lebih pada bentuk pendekatan sosial keagamaan yang menjadi program P3A Kab. Sidoarjo



1	2	3	4
2.	Azzizah Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang, 2007	Pemahaman Istri Korban tentang Kekerasan Rumah Tangga yang Dilakukan Seami (studi dikelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing Kotamadya Malang)	Dalam penelitiannya melakukan sebuah observasi secara personal terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dikelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing Kotamadya Malang dan mendeskripsikan tentang pemahaman korban akan KDRT.
3.	Ririn Rinawati, Dedeh fardiah (Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Bandung, 2016)	Komunikasi Antarpribadi Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Terhadap Anak.	Faktor intensitas komunikasi, keterbukaan, empati orang tua kepada anak, sikap mendukung orang tua kepada anak, sikap positif orang tua kepada anak, kesetaraan orang tua dan anak dalam komunikasi keluarga, merupakan faktor-faktor yang sangat berpengaruh dalam mencegah kekerasan pada anak.
4.	Lutfi Hariyanto, (Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta Juli 2016)	Pelaksanaan Pendampingan Konseling Di Rifka Annisa Dalam Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).	Pelaksanaan pendampingan konseling di Rifka Annisa dalam pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Dampak positif pendampingan konseling adalah timbulnya rasa percaya diri pada klien, klien mempunyai motivasi untuk bisa lebih mandiri, dampak negatif pendampingan konseling Di Rifka Annisa dalam pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adanya perceraian.
5.	Kasmiati, (Jurusan PMI Konsentrasi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Alauddin Makassar 2016)	Peran Pegawai Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto	menunjukkan bahwa peran pegawai dinas sosial hanya sebatas bersosialisasi masyarakat yang mengalami masalah kekerasan dalam rumah tangga hanya melaporkan kepihak keamanan yaitu kepolisian. Hal itu dikarenakan faktor anggaran pemerintah.
6.	Neri Apriliana Iyoq, (Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu	Efektivitas Komunikasi Orang Tua Pada Anak Dalam Membentuk Perilaku Positif	Penelitian ini menjelaskan bagaimana keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif dan kesetaraan dalam komunikasi dengan anak mampu membentuk perilaku positifnya.



DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

1	2	3	4
	Politik Universitas Mulawarman, 2017)		
7.	Yulanda Trisula Sidarta Yohanes, Deni Darmawan, dan Sanggar Kanto. (Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, 2014)	Komunikasi Interpersonal Konselor Woman Crisis Center Rumah Perempuan Kabupaten Pasuruan Pada Remaja Perempuan Korban Pasca Kekerasan.	Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan melakukan pendekatan secara personal kepada korban dan mengikuti segala permintaan demi kepentingan privasi korban. Korban akan merasa nyaman untuk bercerita dan mampu keluar dari trauma yang dialami.
8.	Yudi Bowo Prasetya, 2017	Evaluasi Pelaksanaan Program Surabaya Single Window (SSW) Di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Kota Surabaya	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan program Surabaya Single Window (SSW) Di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Kota Surabaya sudah efektif dan efisien. Hal ini karena dari enam aspek efektivitas lima dapat dikatakan cukup efektif dan satu tidak. Kemudian, dari perbandingan antara output dan input menunjukkan bahwa proses implementasi sudah efisien.
9.	Disya Anggreni Manurung, Harapan Tua Ricky Freddy Simanjuntak (Jurnal Niara Vol. 14, No. 2 September 2021)	Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru	Kinerja dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota pekanbaru sudah cukup baik, karena dari 5 indikator pengukuran kinerja yang dilakukan peneliti sudah hampir semuanya terpenuhi walaupun belum maksimal. Serta faktor penghambat kinerja yaitu anggapan masyarakat untuk melapor ialah merasa aib, tabu atau hal yang memalukan sehingga lebih baik disimpan sendiri, anggaran yang terbatas dan tidak bisa memenuhi rencana kegiatan dan program-program yang akan dilaksanakan, serta keterbatasan sarana dan prasarana yang ada.

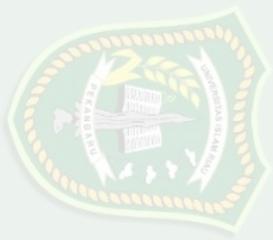


1	2	3	4
10.	Puri Pramudini, dkk (Jurnal Comunita Servizio Vol 3, No. 1, Tahun 2021)	Sosialisasi Tentang Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan dalam Rangka Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Pelaksanaan sosialisasi berjalan dengan sangat baik diikuti oleh peserta baik yang bergabung secara langsung melalui ruang zoom sekitar 500 orang, dan juga yang menyaksikan melalui youtube channel, Facebook dan Instagram DPPAPP. Kegiatan sosialisasi secara daring ini mendapat respon yang sangat positif dari warga masyarakat, terbukti dari antusiasnya para peserta dalam mengajukan pertanyaan terkait topik yang dibawa, yang selanjutnya ditanggapi dengan sangat detail oleh para narasumber.

Berdasarkan dari 10 penelitian terdahulu yang dijadikan sumber rujukan dan referensi dalam penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian terdahulu. Perbedaan penelitian ini terdapat dari teori atau indikator yang digunakan dan lokasi serta tahun penelitian yang berbeda.

2.3 Kerangka Pikir

Kerangka pikir digunakan untuk memberiksn bstsdn terhadap kajian teori yang berguna untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap penelitian ini, dan menjabarkan dalam bentuk nyata, karena kajian teori masih bersifat abstrak, dan sepenuhnya masih belum juga dapat diukur dilapangan. Adapun indikator-indikator yang dapat dilihat dari Pelaksanaan Program Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Di Kota Dumai sebagai berikut:



Administrasi Publik
Dinas P3A merupakan kumpulan kerjasama dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan.

Organisasi Publik
Dinas P3A merupakan organisasi dengan sistem terbuka yang terdiri dari inovasi proses dan output/outcome.

Manajemen Publik
Dinas P3A melaksanakan fungsi-fungsi manajemen.

Pelaksanaan Program Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.

Indikator:

- 1. Rumusan Rencana Kegiatan**
- 2. Pelaksanaan Kegiatan**
- 3. Pengawasan atau Pengendalian Kegiatan**

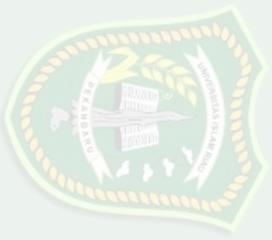
(Sufian Hamim, 2013)

Kriteria Penilaian Variabel

- a. Terlaksana**
- b. Cukup Terlaksana**
- c. Kurang Terlaksana**

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Tentang Pelaksanaan Program Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak DiDinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.

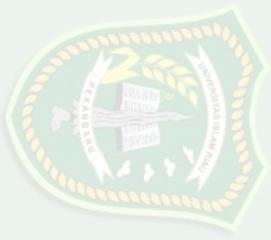
(Sumber: Modifikasi Penulis, 2022)



2.4 Konsep Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam penggunaan istilah penulisan ini, maka berikut ini penulis tuangkan konsep-konsep yang telah dipaparkan sebelumnya dalam bentuk nyata secara operasionalnya tentang hasil kajian sebagai berikut:

1. Administrasi adalah keluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati bersama sesuai pembagian tugas dan fungsi kerjanya masing-masing. Sedangkan administrasi publik adalah suatu proses pelaksanaan atau implementasi dari aktivitas pemerintah yang berhubungan erat dengan fungsi manajemen dengan mempertimbangkan nilai efektifitas dan efisiensi dalam rangka mencapai tujuan yang dikehendaki.
2. Organisasi adalah tempat atau wadah untuk melaksanakan suatu kerjasama sekelompok orang dalam mencapai suatu tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan organisasi publik adalah salah satu wadah yang menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang didalam penyelenggaraan pelayanan publik, dilandasi dengan pengaturan hukum yang mendukungnya.
3. Manajemen merupakan segala aktifitas-aktifitas perencanaan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai



sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien. Sedangkan manajemen publik diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan dengan serangkaian keterampilan (skill).

4. Pelaksanaan merupakan salah satu fungsi manajemen dan berhubungan langsung dengan unsur manusia dan pegawai yang melaksanakan suatu aktivitas dalam organisasi tersebut. Sebagai unsur yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan, dipimpin dituntut memiliki kemampuan serta keahlian untuk melaksanakan serta menjalankan tugasnya secara baik.
5. Sosialisasi merupakan Proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan sampai tingkat tertentu norma-norma sosialnya, sehingga membimbing orang tersebut untuk memperhitungkan harapan-harapan orang lain.
6. Indikator pelaksanaan sosialisasi pada penelitian menggunakan teori yang bersumber dari Hamim (2013) yakni:
 - a. Rumusan rencana kegiatan merupakan kejelasan yang ditetapkan instansi terkait dalam melaksanakan program kegiatan yang telah diagendakan. Kejelasan tersebut terdiri dari adanya tujuan, pelaksana dan sasaran, tempat dan waktu, alokasi anggaran, dan metode pelaksanaan.
 - b. Pelaksanaan kegiatan merupakan aktivitas kegiatan program yang dijalani berdasarkan struktur yang telah ditetapkan. Pelaksanaan

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU



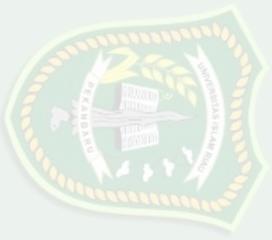
kegiatan ini terdiri dari struktur dan tupoksi tim, kepemimpinan tim, komunikasi tim, dan koordinasi tim.

- c. Pengawasan atau pengendalian kegiatan merupakan langkah yang dilakukan untuk mengontrol kegiatan atas program yang dilaksanakan melalui rencana pengawasan, pelaporan, evaluasi, dan koreksi atas penyimpangan.

2.5 Operasional Variabel

Tabel 2.2 Operasional Variabel Pelaksanaan Program Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Kategori
1	2	3	4	5
Pelaksanaan adalah proses dimana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. (Sufian Hamim, 36:2013)	Pelaksanaan program kegiatan sosialisasi pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai	1. Rumusan Rencana Kegiatan.	a. Kejelasan perumusan tujuan b. Kejelasan siapa pelaksana dan sasaran c. Kejelasan tempat kegiatan d. Kejelasan waktu kegiatan e. Kejelasan anggaran kegiatan f. Kejelasan metode dan prosedur	- Terlaksana - Cukup Terlaksana - Kurang Terlaksana
		2. Pelaksanaan Kegiatan	a. Struktur dan Tupoksi Tim b. Kepemimpinan Tim c. Komunikasi Tim d. Koordinasi Tim	- Terlaksana - Cukup Terlaksana - Kurang Terlaksana



Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Kategori
1	2	3	4	5
		3. Pengawasan (Pengendalian Kegiatan)	a. Standar (rencana) Pengawasan b. Pelaporan Kegiatan (laporan kemajuan kegiatan) c. Evaluasi Kegiatan d. Koreksi Penyimpangan.	- Terlaksana - Cukup Terlaksana - Kurang Terlaksana

Sumber: Modifikasi Penulis 2022

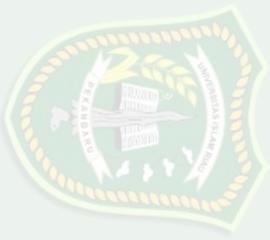
2.6 Teknik Pengukuran

Adapun untuk melihat upaya yang dilakukan dengan melihat Pelaksanaan Program Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai terhadap indikator penilaian yaitu Rumusan Rencana Kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan, dan Pengawasan (Pengendalian Kegiatan). Adapun teknik pengukuran terdapat pelaksanaan variabel dan indikator dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi 3 kategori yaitu:

- Terlaksana
- Cukup Terlaksana
- Kurang Terlaksana

Ukuran Variabel:

Terlaksana : Apabila Pelaksanaan Program Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan



Anak Kota Dumai yang dinilai dan dianalisis berada pada kategori 67%-100% dan hasil jawaban responden.

Cukup Terlaksana : Apabila Pelaksanaan Program Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai yang dinilai dan dianalisis berada pada kategori 34%-66% dan hasil jawaban responden.

Kurang Terlaksana: Apabila Pelaksanaan Program Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai yang dinilai dan dianalisis berada pada kategori 1%-33% dan hasil jawaban responden.

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini bersifat kuantitatif dan kualitatif saling melengkapi dengan menggunakan suvery deskriptif dengan tujuan pemahaman masalah yang ada pada saat ini. Sugiyono (2018: 8) mengatakan metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic menggunakan tabel frekuensi.

Dengan demikian penelitian ini berjenis kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Secara umum data yang didapat dari suatu penelitian untuk memecahkan, memahami, serta mengantisipasi masalah dengan berpedoman pada konsep dan menghasilkan sebuah teori. Selanjutnya pada penelitian ini menggunakan kuesioner guna menghimpun data.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Dumai yang berlokasi di Jalan Putri Tujuh Komplek Perumahan Dinas Pemko Dumai No.2 Dumai. Adapun alasan Penulis mengambil lokasi penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Dumai dikarenakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Dumai merupakan salah satu



intansi publik yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat terutama dalam hal melindungi dan meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak. Intansi ini memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab untuk kesejahteraan hidup masyarakat yang ada di Kota Dumai.

3.3 Populasi dan Sampel

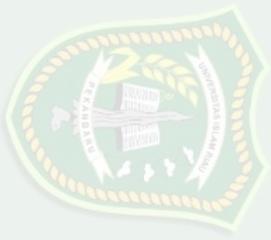
Menurut Sugiyono (2018:115) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karateristik yang dimiliki oleh populasi.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dan masyarakat Kota Dumai yang pernah mengalami kekerasan. Untuk lebih jelas tentang populasi dan sampel penelitian yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

No.	Keterangan	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Dinas	1	1	100%
2	Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan	1	1	100%
3	Sub Bagian Seksi Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak	1	1	100%
	Sub Bagian Seksi Penanganan Kkerasan Perempuan dan Anak	1	1	
4	Sub Bagian Seksi Pemberdayaan Korban dan Kekerasan Perempuan dan Anak	1	1	100%
5	Masyarakat yang mengalami kekerasan	121	18	15%
	Jumlah	128	23	

Sumber: Olahan Penelitian, 2022.



3.4 Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sensus dan simple random sampling. Sensus menurut Sugiyono (2011:98) “sampling jenuh atau sensus adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota digunakan sebagai sampel. Sampel sensus digunakan dalam penarikan sampel dari populasi pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai yakni berjumlah 5 orang.

Sugiyono (2011:126) simple random sampling adalah pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Dengan demikian untuk penetapan sampel pada masyarakat yang mengalami kekerasan menggunakan teknik simple random sampling yakni sebesar 15% atau sebanyak 18 orang dari jumlah populasi.

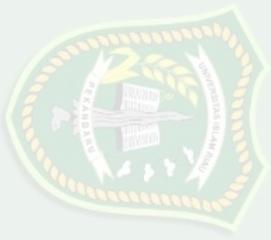
3.5 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari responden penelitian. Menurut Sugiyono (2012:137) yang menyatakan bahwa, “Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Data yang diperlukan meliputi data tentang permasalahan penelitian yang bersumber dari kuesioner dan wawancara.

2. Data sekunder

Pengertian dari data sekunder menurut Sugiyono (2012:137) adalah Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data,



misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder antara lain disajikan dalam bentuk data-data dokumen, tabel- table mengenai topik penelitian. Data yang diperoleh dapat langsung dari objek penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Dumai antara lain:

- a. Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.
- b. Keadaan dan Komposisi Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.
- c. Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Pokok serta uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.
- d. Sarana dan prasarana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yakni penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap berbagai objek dalam tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di daerah sampel penelitian..
- b. Wawancara, yaitu melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait seperti sekretaris, kasubbag, dan ASN/Fungsional Umum untuk mendapatkan data tentang bagaimana pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- c. Kuesioner, yaitu suatu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penyebaran daftar pertanyaan tertulis yang telah disusun secara sistematis berkaitan Pelaksanaan Program Kegiatan Sosialisasi



Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak terhadap responden yang dijadikan sampel oleh penelitian ini.

- d. Dokumentasi, yakni data penulis peroleh dari hasil arsip maupun dari karya ilmiah yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, baik itu data yang bersumber dari UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, photo, dan surat-surat lainnya maupun dari buku karya ilmiah yang telah dipublikasikan.

3.7 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dikumpulkan dan dikelompokkan menurut jenis data. Kemudian dianalisis berdasarkan penjelasan dan uraian dari tabel persentase penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, setelah dikumpulkan lalu dikelompokkan melalui tanggapan hasil kuesioner menurut jenisnya lalu disusun dan kemudian diolah kedalam bentuk tabel, setelah itu diuraikan dan kemudian diberikan pembahasan sekaligus penarikan hasil kesimpulan dari penelitian yang dilaksanakan.

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Singkat Kota Dumai

4.1.1. Keadaan Geografis

Kota Dumai terletak pada posisi antara $1^{\circ}23'00''$ - $1^{\circ}24'23''$ Lintang Utara dan $101^{\circ}23'37''$ - $101^{\circ}28'13''$ Bujur Timur. Kota Dumai mempunyai luas 1,727.38 Km² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Rupat.

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kecamatan Rimba Melintang, Kecamatan Batu Hampar, Kecamatan Bangko, dan Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir.

Kota Dumai berada dalam satu hamparan dengan luas wilayah 1.727,38 km². Kecamatan terluas adalah Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan dengan jarak ke ibukota Kabupaten terjauh adalah Kecamatan Medang Kampai.

Sebagian wilayah Kota Dumai terdiri dari dataran rendah di bagian Utara dan sebagian dataran tinggi di bagian Selatan. Di wilayah Kota Dumai terdapat 53



buah sungai yang dapat dilayari oleh kapal pompong, sampan, dan perahu sampai jauh ke daerah hulu sungai. Sungai Buluala, Sungai Senepis, dan Sungai Mesjid merupakan tiga sungai yang terpanjang.

Kota Dumai beriklim tropis dengan suhu udara pada tahun 2020 berkisar antara 21,4 0C - 36,4 0C dan terdapat dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan terbanyak di Kota Dumai selama tahun 2020 terjadi pada bulan November yaitu 366,8 mm³, sedangkan yang terkecil terjadi pada bulan Maret yaitu 69,1 mm³. Sementara itu jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan September dan November sebanyak 25 hari dan terkecil pada bulan Maret yaitu sebanyak 11 hari.

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kota Dumai

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase
1	Bukit Kapur	Bukit Nenas	200,00	11,58%
2	Medang Kampai	Teluk Makmur	373,00	21,59
3	Sungai Sembilan	Lubuk Gaung	975,38	56,47
4	Dumai Barat	Purnama	44,98	2,60
5	Dumai Selatan	Bukit Datuk	73,50	2,60
6	Dumai Timur	Teluk Binjai	47,52	2,75
7	Dumai Kota	Laksamana	13,00	0,75
Total			1.727,39	100

Sumber: BPS Kota Dumai, 2022.

4.1.2. Kependudukan

Jumlah penduduk Kota Dumai menurut hasil sensus penduduk tahun 2010 (SP 2010) sebanyak 253.803 jiwa dan luas wilayah seluas 1.727,38 km² sehingga kepadatan penduduk di Kota Dumai tahun 2010 adalah 147 jiwa per km². Dengan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2010 sampai 2020 sebesar 2,17 persen, jumlah penduduk Kota Dumai pada tahun 2020 bertambah menjadi 316.782 jiwa.



Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 162.769 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 154.013 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebanyak 183 jiwa per km².

Kecamatan dengan penduduk terbanyak tahun 2020 adalah Dumai Timur dengan jumlah penduduk 68.930 jiwa (21,76 persen), sedangkan kecamatan dengan penduduk terendah adalah Medang Kampai dengan jumlah penduduk 16.794 jiwa (5,30 persen).

Berdasarkan kelompok umur, penduduk Kota Dumai paling banyak berada pada kelompok umur 0-4 tahun dan paling sedikit pada kelompok umur 75 tahun ke atas, dengan jumlah masing-masing sebesar 33.966 jiwa dan 2.480 jiwa.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kota Dumai Berdasarkan Kecamatan

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Bukit Kapur	26.693	24.871	51.564
2	Medang Kampai	8.667	8.127	16.794
3	Sungai Sembilan	21.772	19.966	41.738
4	Dumai Barat	22.525	21.767	44.292
5	Dumai Selatan	27.043	25.748	52.791
6	Dumai Timur	35.413	33.517	68.930
7	Dumai Kota	20.656	20.017	40.673
	Jumlah	162.769	154.013	316.782

Sumber: BPS Kota Dumai, 2022.

4.2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai

4.2.1 Visi dan Misi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai disusun mengacu pada Visi Pembangunan Kota Dumai yang hendak diwujudkan pada tahun 2021 yaitu : Maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai untuk merealisasikan hal tersebut melalui Visi, Misi yang cukup realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.



a. Visi

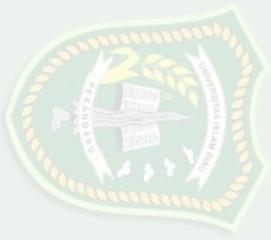
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai serta melihat latar belakang dan mencermati fenomena-fenomena yang ada, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai sepenuhnya mendukung Visi dari Pemerintah Kota Dumai yang ingin diwujudkan pada Tahun 2020, sebagaimana tersebut di atas mengingat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai merupakan bagian integral dari Pemerintah Kota Dumai.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Dumai, akan senantiasa menjadi pendukung Pemerintah Kota Dumai untuk melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan maupun tugas-tugas pembangunan dalam mewujudkan Misi Pemerintah Kota Dumai. Hal ini karena Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai merupakan Perangkat Daerah pelaksana penanganan perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat di Kota Dumai, terutama erat kaitannya dengan **Strategi** untuk meningkatkan sumber daya manusia daerah, dengan penekanan pada : **Keadilan Gender, Perlindungan**

Perempuan dan Anak di Kota Dumai

b. Misi

Terwujudnya Visi sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan tantangan yang harus dihadapi. Sebagai bentuk nyata dari Visi di atas maka ditetapkan Misi Pemerintah Kota Dumai yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada Visi akan



tampak lebih nyata pada Misi tersebut. Lebih jauh, pernyataan Misi Pemerintah Kota Dumai memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh Organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana Organisasi memenuhi kebutuhan tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai mendukung Misi ke 4 yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Misi 4 : Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.

Makna dari Misi ini adalah untuk mencapai prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Misi tersebut disusun dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan ataupun tuntutan pada masyarakat, yang menginginkan adanya peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga, serta meningkatkan perlindungan perempuan. Melalui Misi tersebut kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai harus dilaksanakan sejalan dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai melalui program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai setiap tahunnya.

Dengan berdasarkan kepada faktor-faktor penentu keberhasilan berarti Organisasi telah memperhitungkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, sehingga tujuan yang ditetapkan menjadi lebih rasional.

4.2.2 Struktur Organisasi

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah

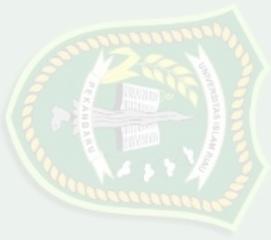


Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Dumai No. 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, maka Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai adalah sebagai berikut:

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dibantu oleh jajaran struktural :

- 1. Sekretaris**, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Perencanaan.
 - 2) Subbagian Tata Usaha.
 - 3) Subbagian Keuangan dan Aset.
- 2. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Ketahanan Keluarga**, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi
 - 2) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum
 - 3) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ketahanan Keluarga
- 3. Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak**, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pemenuhan Hak Anak.
 - 2) Seksi Perlindungan Anak.
 - 3) Seksi Partisipasi Anak.
- 4. Bidang Perlindungan Hak Perempuan**, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak.
 - 2) Seksi Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak.
 - 3) Seksi Pemberdayaan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak.
- 5. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak**, terdiri dari:
 - 1) Seksi Data Informasi Gender.
 - 2) Seksi Data Informasi Anak.
 - 3) Seksi Kelembagaan Organisasi Perempuan dan Anak.
- 6. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak**, terdiri dari:
 - 1) Kepala Unit Pelaksana Teknis.
 - 2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

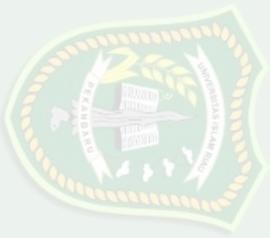
Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat menjadi UPT PPA memiliki tugas untuk melaksanakan



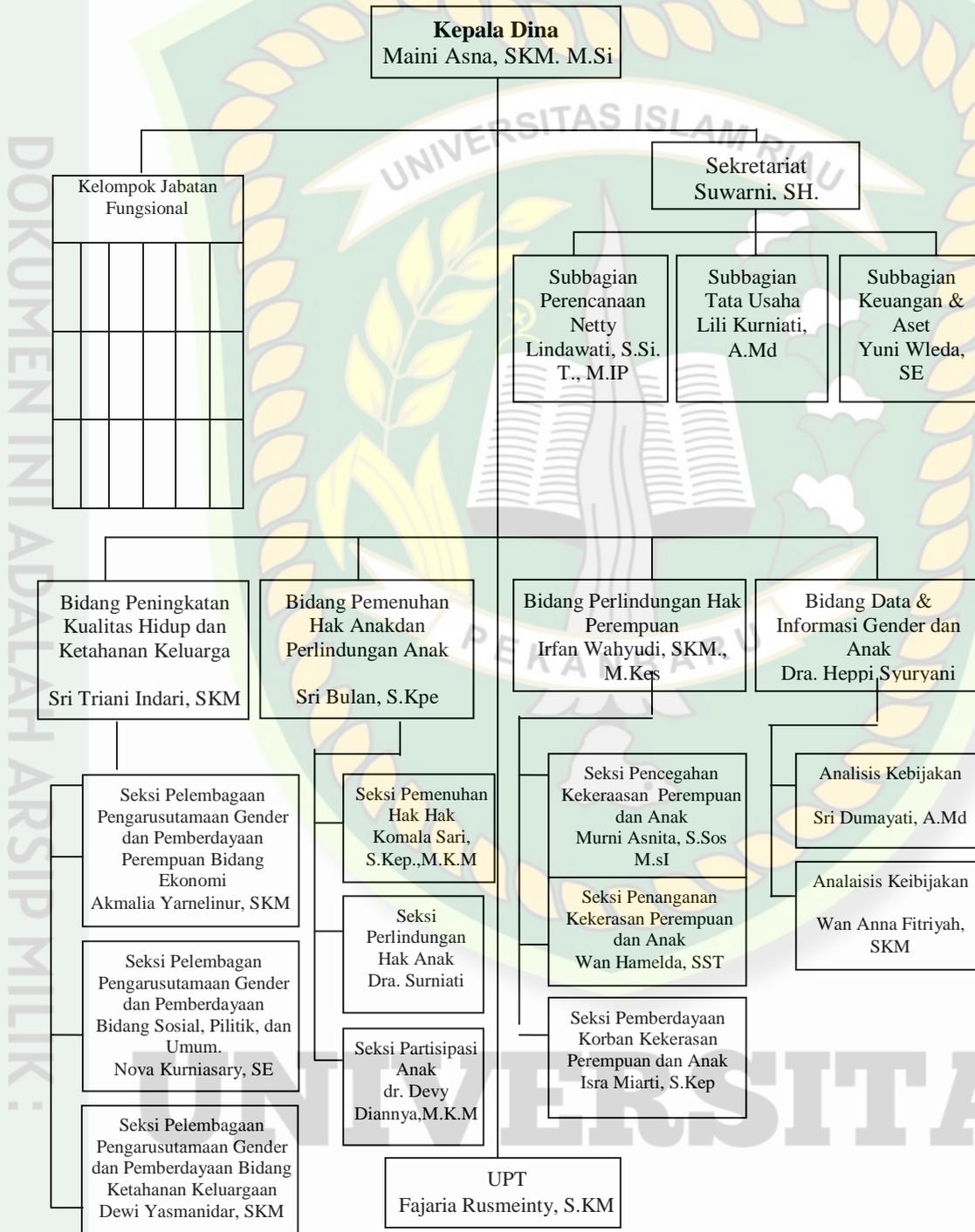
kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. UPT PPA berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Fungsi UPT PPA adalah menyelenggarakan layanan :

- a. Pengaduan masyarakat
- b. Penjangkauan korban
- c. Pengelolaan kasus
- d. Penampungan sementara
- e. Mediasi dan
- f. Pendampingan korban

UPT PPA merupakan UPT generik yang dalam prinsip pembentukannya berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis. Kebijakan pembentukan UPT PPA sebagai penyedia layanan perlindungan bagi perempuan dan anak telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPT PPA. Pembentukan UPT PPA Kota Dumai ditetapkan berdasar Peraturan Walikota Dumai Nomor 36 Tahun 2018 tanggal 20 Juli 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.



Adapun struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai



4.2.3. Jumlah Pegawai

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 69 (enam puluh sembilan) orang, terdiri dari :

- a. Jabatan Struktural : 23 orang
- b. Pengelola Keperawatan : 7 orang
- c. Pengelola Kebidanan : 2 orang
- d. Analis Farmasi : 1 orang
- e. Tenaga harian lepas : 36 orang

Pegawai menurut jenis kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 33 orang, Tenaga Kerja Perjanjian Kontrak (TKPK) sebanyak 36 orang terdiri dari, administrator 11 orang, jasa tenaga pendamping/penyuluhan 11 orang, psikolog 1 orang, tenaga operator 2 orang, *security* 6 orang, supir 2 orang dan *cleaning service* 3 orang.

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Identitas Responden

Sebelum mendeskripsikan dan menganalisis hasil penelitian yang telah diperoleh, maka terlebih dahulu dipaparkan identitas responden sebagai bentuk gambaran karakteristik sumber data yang digunakan pada penelitian ini. identitas responden yang digunakan yakni terdiri dari jenis kelamin, umur, pendidikan, dan pekerjaan. Identitas responden ini dipaparkan dengan jumlah dari pegawai sebanyak 5 orang yakni terdiri dari 2 orang informan dan 3 orang responden serta sebanyak 18 orang responden dari masyarakat.

Untuk itu, semua karakteristik yang melekat pada responden dipaparkan satu persatu sebagai berikut:

5.1.1. Jenis Kelamin

Jenis kelamin merupakan salah satu karakteristik yang terlihat secara nyata, sehingga mudah untuk penentuannya. Jenis kelamin terbagi dua yakni laki-laki dan perempuan keduanya memiliki karakter yang berbeda, sehingga bila ada keduanya yang menjadi responden akan memperkaya tanggapan atas satu permasalahan dan dapat dijadikan tolak ukur pemecagahan masalah. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis kelamin responden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:



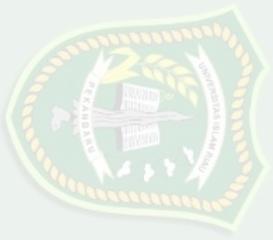
Tabel 5.1 Kategori Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Pegawai Dinas		Masyarakat		Jumlah Keseluruhan	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	1	20%	3	16,7%	4	17,4%
2	Perempuan	4	80%	15	83,3%	19	82,6%
Jumlah		5	100%	18	100%	23	100%

Sumber: Data Penelitian, 2022.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jenis kelamin responden sudah terwakili dari laki-laki dan perempuan baik dari pegawai Dinas maupun masyarakat. Dari pegawai responden berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1 orang atau 20% dan perempuan sebanyak 4 orang atau 80%. Sedangkan dari masyarakat berjenis kelamin laki-laki sebanyak 3 orang atau 16,7% dan jenis kelamin perempuan sebanyak 15 orang atau 83,3%. Dengan jumlah keseluruhan terdapat sebanyak 4 orang berjenis kelamin laki-laki dan 19 orang berjenis kelamin perempuan.

Dengan demikian jelaslah bahwa pada penelitian dilihat dari jenis kelamin sudah terwakili dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, sehingga diharapkan hasil penelitian ini bisa mendapatkan data dan fakta yang objektif, dikarenakan semua pertanyaan sama diajukan pada kedua jenis kelamin yang ada. Melalui responden yang berasal dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan sosialisasi yang ada, sehingga memudahkan memahami, dan dapat dicarikan jalan keluarnya ataupun implikasi dari permasalahan yang ada.



5.1.2. Tingkat Usia

Usia menjadi gambaran seseorang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan wawasan, serta berpikir yang lebih kritis. Di mana pada penelitian ini tingkat usia menjadi salah satu faktor individu yang dilihat sebagai gambaran identitas responden penelitian. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat usia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2 Kategori Responden Berdasarkan Tingkat Usia

No.	Tingkat Usia (Tahun)	Pegawai Dinas		Masyarakat		Jumlah Keseluruhan	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	< 20	-	-	7	38,9%	7	30,4%
2	21 – 30	-	-	3	16,7%	3	13,1%
3	31 – 40	-	-	4	22,2%	4	17,4%
4	41 - 50	4	80%	3	16,7%	7	30,4%
5	> 51	1	20%	1	5,6%	2	8,7%
Jumlah		5	100%	18	100%	23	100%

Sumber: Data Penelitian, 2022.

Dari data yang dipaparkan pada tabel tersebut, maka dapat dilihat tingkat usia dari masing-masing responden dari pegawai dan masyarakat. Di mana pada tingkat usia < 20 tahun terdapat sebanyak 7 orang, tingkat usia 21-30 tahun sebanyak 3 orang, tingkat usia pada rentang 31-40 tahun sebanyak 4 orang, dan tingkat usia pada rentang 41-50 tahun sebanyak 7 orang, serta terakhir tingkat usia pada rentang >51 tahun sebanyak 2 orang.

Dengan demikian jelaslah bahwa pada penelitian ini semua responden berada pada tingkat usia 11 – 53 tahun. Melalui tingkat usia yang dimiliki responden ini diharapkan mampu memberikan tanggapan yang sesuai dengan pemahamannya, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai keadaan



pelaksanaan program sosialisasi kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Dumai.

5.1.3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan menjadi salah satu dari 3 identitas responden yang digunakan sebagai gambaran mengenai pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki responden. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.3 Kategori Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Pegawai Dinas		Masyarakat		Jumlah Keseluruhan	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	SD	-	-	3	16,7%	3	13,1%
2	SMP	-	-	6	33,3%	6	26,0%
3	SMA	-	-	9	50,0%	9	39,1%
4	S-1	2	40%	-	-	2	8,7%
5	S-2	3	60%	-	-	3	13,1%
Jumlah		5	100%	18	100%	23	100%

Sumber: Data Penelitian, 2022.

Data yang tertuang pada tabel di atas, dapat digambarkan mengenai tingkat pendidikan responden. Di mana dari jenis pendidikan baik pegawai diketahui sebanyak 2 orang berlatar belakang pendidikan S-1, dan terdapat sebanyak 3 orang yang berlatar belakang pendidikan S-2. Sementara dari masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan SD sebanyak 3 orang, pendidikan SMP sebanyak 6 orang, dan yang memiliki pendidikan SMA sebanyak 9 orang.

Berdasarkan latar belakang pendidikan yang dimiliki responden berasal dari pegawai maupun dari masyarakat diketahui bahwa pendidikan akhir responden mulai dari SD sampai S-2. Gambaran latar belakang pendidikan ini menjelaskan bahwa responden memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda,



sehingga memiliki tanggapan yang berbeda mengenai permasalahan yang diteliti dan tentunya memperkaya tanggapan atas penelitian ini.

5.1.4 Pekerjaan

Jenis pekerjaan menjadi salah satu yang turut melekat pada diri seseorang sebagai identitas diri. Jenis pekerjaan memberikan gambaran status pekerjaan dan dijadikan sebagai salah satu sumber pengetahuan yang dimilikinya. Untuk lebih jelasnya mengenai pekerjaan responden dapat dilihat pada tabel berikut:

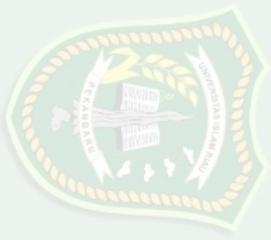
Tabel 5.4 Kategori Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Pegawai Dinas		Masyarakat		Jumlah Keseluruhan	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	PNS	5	100%	-	-	5	21,7%
2	Buruh	-	-	1	5,6%	1	4,3%
3	IRT	-	-	8	44,4%	8	34,8%
4	Karyawan	-	-	1	5,6%	1	4,3%
5	Mahasiswa	-	-	1	5,6%	1	4,3%
6	Pelajar	-	-	6	33,3%	6	26,1%
7	Wiraswasta	-	-	1	5,6%	1	4,4%
Jumlah		5	100%	18	100%	23	100%

Sumber: Data Penelitian, 2022.

Data yang teruang pada tabel di atas memberikan penjelasan bahwa responden pada penelitian ini berasal dari pegawai Dinas P3A Kota Dumai yang seluruhnya bestatus PNS. Sedangkan dari masyarakat memiliki beragam jenis pekerjaan, sebanyak 8 orang memiliki pekerjaan sebagai IRT, sebanyak 6 orang memiliki latar belakang pekerjaan sebagai pelajar, sementara dari jenis pekerjaan buruh, karyawan, mahasiswa, dan wiraswasta masing-masingnya 1 orang.

Dengan Demikian jelalah dari latar belakang identitas responden yang dilihat dari pekerjaan memiliki jenis pekerjaan yang berbeda dan tentunya memiliki kesempatan yang berbeda baik dari waktu maupun kesempatan untuk



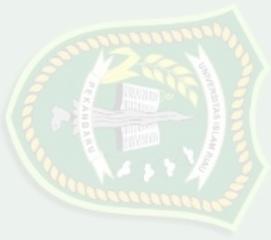
menghadiri atau mengikuti kegiatan sosialisasi. Selain itu dari jenis pekerjaan yang berbeda ini menggambarkan bahwa korban kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa menyasar siapa saja tanpa memandang dari status pekerjaan.

5.2. Pembahasan Hasil Penelitian

Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terus terjadi di berbagai daerah Indonesia tidak terkecuali di Kota Dumai. Adanya kekerasan yang terus menerus terjadi, maka perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat untuk menangkalnya agar tindak kekerasan bisa dikurangi dan bahkan ditiadakan. Salah langkah yang bisa dilakukan adalah dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat arti pentingnya pencegahan melalui berbagai rangkaian program kerja yang telah dirumuskan.

Pelaksanaan sosialisasi suatu program kegiatan merupakan langkah yang dijalankan dalam mencapai tujuan dari program yang telah ditetapkan. Pada penelitian pelaksanaan sosialisasi dilakukan dalam program kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Dumai menjadi kewenangan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Melalui sosialisasi yang dilaksanakan ini diharapkan mampu mengedukasi masyarakat dan mengubah perilaku serta sikap, sehingga mengurangi kekerasan pada perempuan dan anak.

Pada penelitian ini pelaksanaan sosialisasi program kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan dengan menetapkan 3 indikator utama sebagai tolak ukur berdasarkan pendapat dari Hamim (2013)



yakni perumusan rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pengawasan (pengendalian kegiatan).

Untuk itu, maka dapat diuraikan satu persatu indikator penelitian yang telah ditetapkan dalam penelitian ini melalui hasil tanggapan responden, wawancara, observasi, maupun perbandingan dengan teori yang digunakan sebagai berikut:

5.2.1 Rumusan Rencana Kegiatan

Rumusan rencana kerja merupakan langkah awal yang ditetapkan Dinas P3A Kota Dumai dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga dengan adanya rencana kerja tersebut dapat diupayakan berbagai langkah selanjutnya dalam rangka pencapaian tujuan yang diharapkan. Dalam rumusan kegiatan rencana yang menjadi tolak ukur pada penelitian ini sebagaimana yang tertuang dalam operasional variabel penelitian yakni adanya tujuan, pelaksana dan sasaran, tempat dan waktu, alokasi anggaran, dan metode pelaksanaan yang telah ditetapkan Dinas P3A Kota Dumai dalam usaha pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Adapun tanggapan yang disampaikan responden berasal dari pegawai Dinas P3A Kota Dumai dan masyarakat Kota Dumai mengenai indikator rumusan rencana kegiatan sosialisasi program pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak dapat dituangkan pada tabel distribusi berikut ini:

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU

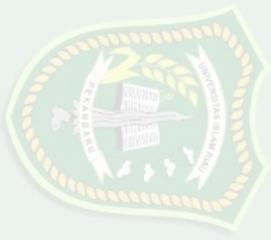


Tabel 5.5 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pada Indikator Rumusan Rencana Kegiatan (Pegawai)

No.	Pertanyaan	Kriteria Pilihan Jawaban						Jumlah
		Terlaksana		Cukup Terlaksana		Kurang Terlaksana		
		F	%	F	%	F	%	
1	Kejelasan perumusan tujuan	4	80%	1	20%	-	-	5
2	Kejelasan siapa pelaksana dan sasaran	5	60%	-	-	-	-	5
3	Kejelasan tempat kegiatan	5	100%	-	-	-	-	5
4	Kejelasan waktu kegiatan	5	100%	-	-	-	-	5
5	Kejelasan anggaran kegiatan	5	100%	-	-	-	-	5
6	Kejelasan metode dan prosedur	3	60%	2	40%	-	-	5
Jumlah		27		3		-		30
Rata-rata		4		1		-		5
Persentase		80%		20%		-		100%
Kategori		Terlaksana						

Sumber: Data Penelitian, 2022.

Berdasarkan data yang dituang pada tabel di atas, jelas memberikan gambaran mengenai tanggapan responden dalam hal ini pegawai DPPPA Kota Dumai tentang perumusan rencana kegiatan dalam sosialisasi program pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah terlaksana atau sebesar 80% dan hanya sebesar 20% menyatakan cukup terlaksana. Hasil ini dapat dilihat dengan telah adanya kejelasan atas perumusan tujuan kegiatan, adanya kejelasan pelaksana dan sasaran dari kegiatan, tempat kegiatan yang sudah ditetapkan, anggaran yang telah disiapkan, dan metode ataupun prosedur sosialisasi yang jelas untuk dilaksanakan.



Hasil yang telah dipaparkan ini memberikan penjelasan bahwa DPPPA Kota Dumai telah melaksanakan sebagian tugasnya untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan melakukan sosialisasi. Dalam pelaksanaannya kegiatan sosialisasi telah dirumuskan secara matang, sehingga diharapkan berdampak pada hasil yang hendak dicapai yakni menurunnya atau hilangnya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Dumai. Metode sosialisasi yang digunakan metode ceramah bukan dialogis, belum menyediakan materi dalam bentuk brosur/famplet dan sosialisasi melalui media.

Tanggapan yang diberikan pegawai DPPPA Kota Dumai ini tidak serta merta dijadikan pedoman dalam pengambilan kesimpulan pada indikator rumusan rencana kegiatan. Untuk itu perlu adanya informasi yang lain terutama dari masyarakat yang pernah mengalami kekerasan, sehingga dapat menggambarkan dengan jelas keadaan pelaksanaan sosialisasi pada indikator rumusan rencana kegiatan. Untuk itu dapat dilihat hasil tanggapan dari masyarakat sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



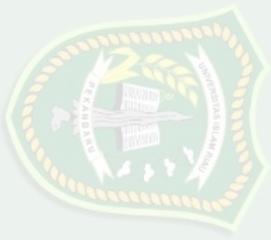
Tabel 5.6 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pada Indikator Rumusan Rencana Kegiatan (Peserta)

No.	Pertanyaan	Kriteria Pilihan Jawaban						Jumlah
		Terlaksana		Cukup Terlaksana		Kurang Terlaksana		
		F	%	F	%	F	%	
1	Kejelasan perumusan tujuan	8	44,4%	10	55,6%	-	-	18
2	Kejelasan siapa pelaksana dan sasaran	8	44,4%	6	33,3%	4	22,2%	18
3	Kejelasan tempat kegiatan	4	22,2%	9	50%	5	27,8%	18
4	Kejelasan waktu kegiatan	3	16,7%	10	55,6%	5	27,8%	18
5	Kejelasan anggaran kegiatan	1	5,6%	10	55,6%	7	38,9%	18
6	Kejelasan metode dan prosedur	4	22,2%	8	44,4%	6	33,3%	18
Jumlah		28		53		27		108
Rata-rata		5		9		4		5
Persentase		27,8%		50%		22,2%		100%
Kategori		Cukup Terlaksana						

Sumber: Data Penelitian, 2022.

Data yang ditampilkan pada tabel di atas menjelaskan bahwa pelaksanaan sosialisasi program pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Dumai secara umum masih cukup terlaksana atau 50%. Hasil ini terlihat masih cukup terlaksananya kejelasan perumusan tujuan, adanya kejelasan pelaksana dan sasaran kegiatan, telah cukup terlaksana tempat yang menjadi sasaran sosialisasi, dan cukup terlaksana kejelasan waktu kegiatan.

Hasil ini menjelaskan bahwa pelaksanaan sosialisasi program pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Dumai telah dirumuskan



rencananya kegiatannya tetapi kurangnya kejelasan tempat dan waktu pelaksanaan, sehingga masyarakat tidak mengetahui dengan pasti pelaksanaan sosialisasi yang diadakan. Hal ini tentu menjadi perhatian bagi DPPP Kota Dumai untuk bahan evaluasi dalam setiap pelaksanaan sosialisasi program kerja, sehingga sosialisasi yang dilaksanakan tepat sasaran dan mencapai tujuan yang hendak diinginkan.

Hasil wawancara dengan Maini Asna selaku Kepala Dinas PPPA Kota Dumai diperoleh informasi bahwa:

Tujuan dari program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dilaksanakan agar masyarakat tahu tempat pengaduan kalau terjadi masalah yaitu di UPT PPPA (PKM). Mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pelaksana kegiatan yang terlibat yakni Kadis, Kabid, Fungsional (analisis kebijakan) serta staf di bidang PHP (Perlindungan Hak Perempuan). Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di setiap kecamatan dan kelurahan. Di PKK, GOW (Gabungan Organisasi Wanita), dan lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan dari bulan Januari sampai Desember (dibagi per triwulan) dengan anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 15 Juta dari APBD dan Rp. 235 Juta dari APBN. Metode pelaksanaan kegiatan yang digunakan yakni sosialisasi, Bimtek untuk satgas duli empak. Memuat kampung duliempak (tiap kecamatan hanya 1 percontohan) (Hasil wawancara pada tanggal 05 Agustus 2022)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa Dinas P3A Kota Dumai dalam merumuskan rencana kegiatan telah menetapkan tujuan kegiatan dan pelaksanaannya. Salah satu tujuan dari sosialisasi tersebut adalah agar masyarakat tidak lagi menjadi korban kekerasan dan bila terjadi kekerasan tahu di mana tempat pengaduannya, sehingga permasalahannya dapat ditangani dengan segera. Sementara pelaksana yang ditetapkan untuk menjalankan sosialisasi adalah Kadis, Kabid, Fungsional (analisis kebijakan) serta staf di Bidang PHP (Perlindungan Hak Perempuan). Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di setiap kecamatan dan

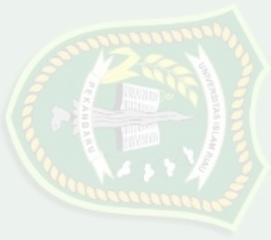


kelurahan dengan lokasi yang menjadi sasaran PKK, GOW (Gabungan Organisasi Wanita), dan lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan dari bulan Januari sampai Desember (dibagi per triwulan) dengan anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 15.000.000,- dari APBD dan Rp. 235.000.000,- dari APBN. Metode pelaksanaan kegiatan yang digunakan yakni sosialisasi, Bimtek untuk satgas duliempak. Memuat kampung duliempak (tiap kecamatan hanya 1 percontohan)

Sementara dari hasil wawancara dengan Irfan Wahyudi selaku Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan diperoleh informasi sebagai berikut:

Tujuan dari program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah untuk meningkatkan pemahaman persepsi masyarakat tentang sosialisasi kekerasan perempuan dan anak. Meningkatkan pengetahuan tentang pencegahan kekerasan perempuan dan anak. Pelaksana dari kegiatan ini adalah bidang terkait dan lintas bidang serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Tempat pelaksanaannya berada di Kelurahan, tempat perwiridan, di tempat strategis lainnya, dan setiap perkumpulan warga. Sementara waktu pelaksanaan sesuai dengan program yang telah ditentukan. Anggaran yang digunakan sesuai dengan anggaran yang disahkan. Sedangkan metode pelaksanaan dalam bentuk metode tanya jawab, banner, leaflet, dan baleho luar (Wawancara pada tanggal 09 Agustus 2022)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa dalam rumusan rencana kegiatan telah dituangkan tujuan dari program kegiatan yakni untuk meningkatkan pemahaman persepsi, pengetahuan, dan cara pencegahannya kepada masyarakat tentang kekerasan pada perempuan dan anak. Pelaksana dari kegiatan ini adalah bidang terkait dan lintas bidang serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Tempat pelaksanaannya berada di Kelurahan, tempat perwiridan, di tempat strategis lainnya, dan setiap perkumpulan warga. Sementara waktu pelaksanaan sesuai dengan program yang telah ditentukan. Anggaran yang digunakan sesuai dengan



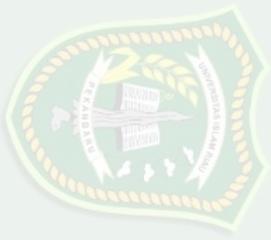
anggaran yang disahkan. Sedangkan metode pelaksanaan dalam bentuk metode tanya jawab, banner, leaflet, dan baleho luar.

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan pejabat dari DPPPA Kota Dumai sangat jelas menggambarkan bahwa telah dirumuskan program kerja dengan menetapkan pelaksana dan sasaran yang hendak dicapai. Kemudian telah ditetapkan tempat dan waktu kegiatan sosialisasinya tetapi tidak dijelaskan dengan detail di mana, kapan waktunya. Sementara anggaran untuk melaksanakan sosialisasi kegiatan ini telah disiapkan, sehingga pelaksanaan sosialisasi bisa berjalan dengan lancar.

Sementara dari pengamatan lapangan atau observasi yang peneliti lakukan terlihat bahwa memang telah ada agenda sosialisasi yang ditetapkan oleh DPPPA dan kegiatan sosialisasinya berada di berbagai tempat dan terutama di ruang rapat yang ada di dinas. Kemudian untuk anggaran memang telah disiapkan sesuai dengan agenda kerja yang telah ditetapkan.

Menurut pendapat Hamim (2013) rumusan rencana kegiatan merupakan kejelasan yang ditetapkan instansi terkait dalam melaksanakan program kegiatan yang telah diagendakan. Kejelasan tersebut terdiri dari adanya tujuan, pelaksana dan sasaran, tempat dan waktu, alokasi anggaran, dan metode pelaksanaan.

Dengan demikian dari tanggapan dan wawancara di atas lalu dibandingkan dengan teori yang digunakan, maka dapat dikatakan bahwa masih terdapat rumusan rencana kegiatan yang belum terlaksana dengan baik. Terdapat kurang jelasnya siapa pelaksana dan sasaran dari setiap kegiatan sosialisasi yang dijalankan, sehingga koordinasi antara masyarakat dengan pegawai kurang



terjalin. Begitu juga kejelasan tempat kegiatan dan waktu kegiatan yang tidak ditetapkan berubah-ubah, sehingga masyarakat menjadi bingung untuk menghadirinya dan bisa dikatakan kurang jelasnya tempat dan waktu pelaksanaan sosialisasi program pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Sedangkan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sosialisasi program yang telah dilaksanakan DP3A Kota Dumai yakni metode penyampaian seperti ceramah bukan tanya jawab, kurangnya iklan di youtube, instagram, dan media lainnya. Tidak ada membagikan brosur tentang kekerasan kepada peserta, dan makanan saat sosialisasi tidak tersedia.

Dengan demikian dari hasil tanggapan responden pegawai dan masyarakat, serta tanggapan wawancara dari pejabat DPPPA Kota Dumai tergambar bahwa perumusan rencana kegiatan dalam sosialisasi program pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara keseluruhan sudah dapat dikatakan cukup terlaksana. Hal ini dikarenakan tidak seluruh rumusan rencana kegiatan yang telah dibuat ditetapkan dengan jelas yakni pelaksana kegiatan, tempat, dan waktu kegiatan.

5.2.2. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan merupakan aktivitas yang dijalankan dalam suatu kegiatan yang telah dirumuskan dengan berlandaskan dari tugas dan fungsi ataupun kewenangan yang telah dilimpahkan sebagai pelaksanaannya. Pelaksanaan kegiatan dalam penelitian ini ditetapkan dengan tolak ukur yakni adanya struktur dan tupoksi tim, kepemimpinan tim, komunikasi tim, dan koordinasi tim.



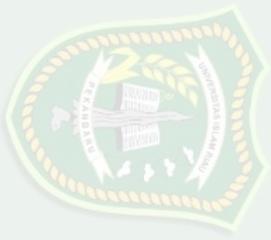
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tanggapan yang disampaikan responden berasal dari pegawai Dinas P3A Kota Dumai dan masyarakat Kota Dumai mengenai pelaksanaan kegiatan, sebagaimana yang dituangkan pada tabel distribusi berikut ini:

Tabel 5.7 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pada Indikator Pelaksanaan Kegiatan (Pegawai)

No.	Pertanyaan	Kriteria Pilihan Jawaban						Jumlah
		Terlaksana		Cukup Terlaksana		Kurang Terlaksana		
		F	%	F	%	F	%	
1	Struktur dan Tupoksi Tim	3	60%	2	40%	-	-	5
2	Kepemimpinan Tim	3	60%	2	40%	-	-	5
3	Komunikasi Tim	1	20%	4	80%	-	-	5
4	Koordinasi Tim	1	20%	4	80%	-	-	5
Jumlah		8		12		-		20
Rata-rata		2		3		-		5
Persentase		40%		60%		-		100%
Kategori		Cukup Terlaksana						

Sumber: Data Penelitian, 2022.

Data yang ditampilkan pada tabel di atas, jelas memberikan gambaran mengenai tanggapan responden yang berasal dari pegawai DPPPA Kota Dumai tentang pelaksanaan kegiatan dalam sosialisasi program pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang menyatakan sudah terlaksana sebanyak 40% dan sebanyak 60% menyatakan cukup terlaksana. Hasil ini dapat dilihat dengan telah ditetapkan struktur dan tupoksi tim pelaksana, adanya kepemimpinan dalam tim pelaksana, dan telah adanya komunikasi antar lini, serta telah adanya koordinasi tim dalam pelaksanaan sosialisasi kegiatan program pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.



Hasil yang telah dipaparkan ini memberikan penjelasan bahwa DPPPA Kota Dumai telah melaksanakan tugasnya dengan menetapkan pelaksana kegiatan yang jelas, sehingga semua kegiatan sosialisasi dilakukan oleh tim khusus yang telah dibentuk. Hal ini tentunya menjadi langkah penting yang dilakukan DPPPA Kota Dumai dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Dumai. Adanya tim khusus yang telah terbentuk dan dipimpin langsung oleh kepala dinas tentunya menjadi harapan besar agar semua kegiatan sosialisasi dapat berjalan dengan lancar. Sementara komunikasi dan koordinasi dalam melaksanakan sosialisasi kegiatan masih kurang baik, sehingga sering kali pemakalah dari materi sosialisasi tidak bisa hadir dan terkadang tempat kegiatan yang telah ditetapkan tidak bisa digunakan untuk kegiatan, serta komunikasi dan koordinasi lainnya yang masih menjadi kendala sangat berarti dalam kegiatan sosialisasi yang dijalankan DP3A Kota Dumai.

Tanggapan yang diberikan pegawai DPPPA Kota Dumai ini tidak serta merta dijadikan pedoman dalam pengambilan kesimpulan pada indikator pelaksanaan kegiatan. Untuk itu perlu adanya informasi yang lain terutama dari masyarakat yang pernah mengalami kekerasan, sehingga dapat menggambarkan dengan jelas keadaan pelaksanaan sosialisasi pada indikator pelaksanaan kegiatan.

Untuk itu dapat dilihat hasil tanggapan dari masyarakat sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU



Tabel 5.8 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pada Indikator Pelaksanaan Kegiatan (Peserta)

No.	Pertanyaan	Kriteria Pilihan Jawaban						Jumlah
		Terlaksana		Cukup Terlaksana		Kurang Terlaksana		
		F	%	F	%	F	%	
1	Struktur dan Tupoksi Tim	4	22,2%	10	55,6%	4	22,2%	18
2	Kepemimpinan Tim	5	27,8%	7	38,9%	6	33,3%	18
3	Komunikasi Tim	10	55,6%	6	33,3%	2	11,1%	18
4	Koordinasi Tim	6	33,3%	10	55,6%	2	11,1%	18
Jumlah		25		33		14		72
Rata-rata		6		8		4		18
Persentase		33,3%		44,5%		22,2%		100%
Kategori		Cukup Terlaksana						

Sumber: Data Penelitian, 2022.

Data yang ditampilkan pada tabel di atas menjelaskan bahwa pelaksanaan sosialisasi program pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Dumai melalui indikator pelaksanaan kegiatan secara umum masih cukup terlaksana atau 44,5%. Hasil ini terlihat adanya kepemimpinan dalam tim yang dibentuk DPPPA, adanya komunikasi tim dengan masyarakat, dan terjalannya koordinasi tim. Dengan demikian jelaslah bahwa pelaksanaan sosialisasi kegiatan pencegahan sudah dijalankan DPPPA Kota Dumai.

Hasil ini menjelaskan bahwa pelaksanaan sosialisasi program pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Dumai telah ditetapkan tim khusus, sehingga semua langkah sosialisasi dilakukan oleh tim tersebut baik itu komunikasi maupun koordinasi kegiatan. Adanya pelaksanaan kegiatan sosialisasi merupakan salah satu upaya yang dilaksanakan DPPPA Kota Dumai dalam



mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga dengan sosialisasi masyarakat teredukasi dan dapat mengantisipasinya.

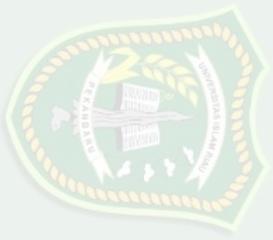
Hasil wawancara dengan Maini Asna selaku Kepala Dinas PPPA Kota Dumai diperoleh informasi bahwa:

Pemimpin dalam program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah Kepala Dinas, Kepala Bidang, Fungsional (analisis kebijakan) serta 1 orang staf jumlahnya 6 orang dari kantor DPPP. Bentuk komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi langsung dengan audience (menjadi pendengar dan adanya tanya jawab) menggunakan slide power point. Bentuk pola koordinasi di dalam tim kalau ada kasus (masalah) tentang kekerasan, satuan tugas/satgas bisa langsung ke UPT PPPA Kota Dumai (Hasil wawancara pada tanggal 05 Agustus 2022)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa dalam sosialisasi program pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak telah ditetapkan struktur dan tupoksi pelaksana yakni terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Bidang, Fungsional (analisis kebijakan) serta 1 orang staf jumlahnya 6 orang dari kantor DPPP. Bentuk komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi langsung dengan audience (menjadi pendengar dan adanya tanya jawab) menggunakan slide power point. Bentuk pola koordinasi di dalam tim kalau ada kasus (masalah) tentang kekerasan, satuan tugas/satgas bisa langsung ke UPT PPPA Kota Dumai

Sementara dari hasil wawancara dengan Irfan Wahyudi selaku Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan diperoleh informasi sebagai berikut:

Tim pelaksana program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Bidang, dan Kasi, serta staf bidang. pola koordinasi tim yang telah dibentuk berupa rapat persiapan, rapat pelaksanaan, dan rapat Monitoring dan evaluasi. (Wawancara pada tanggal 09 Agustus 2022)



Tanggapan yang disampaikan oleh pejabat dari DPPPA Kota Dumai yakni Kepala Dinas dan Kepala Bidang jelas memberikan gambaran bahwa dalam kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan telah dibentuk tim khusus yang terdiri dari 6 orang, sehingga dengan tim khusus yang ada mampu melaksanakan sosialisasi dan menjangkau masyarakat umum. Untuk menjangkau masyarakat dilaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan para korban untuk diberikan bimbingan maupun informasi lainnya untuk mengatasi dan mencegah terulang kembali masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Hasil observasi atau pengamatan lapangan terlihat bahwa dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi program pencegahan kekerasan terhadap perempuan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas dengan dibantu oleh kepala bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, analisis kebijakan, dan staf pelaksana yang diikuti serta dalam kegiatan ini. Untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat menggunakan pesan whatshap group dan telepon langsung dengan peserta sosialisasi yakni masyarakat, sedangkan koordinasi dilaksanakan oleh seluruh tim yang terlibat dalam program sosialisasi.

Pelaksanaan kegiatan menurut Hamim (2013) merupakan aktivitas kegiatan program yang dijalani berdasarkan struktur yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari struktur dan tupoksi tim, kepemimpinan tim, komunikasi tim, dan koordinasi tim. Pada penelitian ini ditemukan dan hasil tanggapan responden dan wawancara, serta observasi disandingkan dengan teori yang digunakan maka ditemukan bahwa masih ada pelaksanaan kegiatan sosialisasi terhadap pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak yang belum



sesuai yakni kepemimpinan tim yang kurang jelas dan koordinasi antar tim dengan masyarakat yang belum berjalan maksimal.

Dengan demikian dari tanggapan yang disampaikan responden (pegawai DPPPA dan masyarakat Kota Dumai) serta dari hasil wawancara, maka dapat dikatakan bahwa indikator pelaksanaan kegiatan dalam melakukan sosialisasi program pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah cukup terlaksana. Hasil ini menjelaskan bahwa DPPPA Kota Dumai telah memiliki instrumen dalam melaksanakan sosialisasi, sehingga diharapkan mampu menjangkau seluruh masyarakat dan mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

5.2.3. Pengawasan (Pengendalian Kegiatan)

Pengawasan atau pengendalian kegiatan merupakan proses tindak lanjut untuk melihat pelaksana dan dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan atau pengendalian adalah langkah yang dilaksanakan dalam mengawasi suatu kegiatan sosialisasi program pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan menetapkan tolak ukur penelitian yakni rencana pengawasan, pelaporan, evaluasi, dan koreksi atas penyimpangan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tanggapan yang disampaikan responden berasal dari pegawai Dinas P3A Kota Dumai dan masyarakat Kota Dumai mengenai pengawasan atau pengendalian kegiatan, sebagaimana yang dituangkan pada tabel distribusi berikut ini:

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU



Tabel 5.9 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pada Indikator Pengawasan (Pengendalian Kegiatan) (Pegawai)

No.	Pertanyaan	Kriteria Pilihan Jawaban						Jumlah
		Terlaksana		Cukup Terlaksana		Kurang Terlaksana		
		F	%	F	%	F	%	
1	Standar (rencana) Pengawasan	2	40%	3	60%	-	-	5
2	Pelaporan Kegiatan (laporan kemajuan kegiatan)	3	60%	2	40%	-	-	5
3	Evaluasi Kegiatan	2	40%	3	60%	-	-	5
4	Koreksi Penyimpangan	1	20%	4	80%	-	-	5
Jumlah		8		12		-		20
Rata-rata		2		3		-		5
Persentase		40%		60%		-		100%
Kategori		Cukup Terlaksana						

Sumber: Data Penelitian, 2022.

Data yang tertuang pada tabel di atas menjelaskan bahwa pelaksanaan sosialisasi program pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Dumai pada indikator pengawasan (pengendalian kegiatan) berada pada kriteria cukup terlaksana atau 60%. Hasil ini dapat dilihat dari tanggapan yang disampaikan responden yang secara keseluruhan telah menginformasikan bahwa DPPPA Kota Dumai belum menetapkan standar (rencana) pengawasan secara terperinci, telah menetapkan dan membuat laporan kegiatan secara umum dalam bentuk LKPI, belum evaluasi atas kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan sehingga tidak dapat dipetakan kelebihan dan kelemahan atas kegiatan yang telah dijalankan, dan belum ada melakukan koreksi atas penyimpangan yang ditemui selama pelaksanaan kegiatan sosialisasi.



Tabel 5.10 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pada Indikator Pengawasan (Pengendalian Kegiatan) (Peserta)

No.	Pertanyaan	Kriteria Pilihan Jawaban						Jumlah
		Terlaksana		Cukup Terlaksana		Kurang Terlaksana		
		F	%	F	%	F	%	
1	Standar (rencana) Pengawasan	4	22,2%	8	44,5%	4	22,2%	18
2	Pelaporan Kegiatan (laporan kemajuan kegiatan)	2	11,1%	10	55,6%	6	33,3%	18
3	Evaluasi Kegiatan	2	11,1%	10	55,6%	6	33,3%	18
4	Koreksi Penyimpangan	2	11,1%	8	44,5%	8	44,5%	18
Jumlah		10		36		24		72
Rata-rata		3		9		6		18
Persentase		16,7%%		50%		33,3%		100%
Kategori		Cukup Terlaksana						

Sumber: Data Penelitian, 2022.

Data yang tertuang pada tabel di atas menjelaskan bahwa pelaksanaan sosialisasi program pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Dumai pada indikator pengawasan (pengendalian kegiatan) berada pada kriteria cukup terlaksana atau 50%. Hasil ini dapat dilihat dari tanggapan yang disampaikan responden yang secara keseluruhan telah menginformasikan bahwa DPPPA Kota Dumai belum menetapkan standar (rencana) pengawasan secara terperinci, telah menetapkan dan membuat laporan kegiatan secara umum dalam bentuk LKPI, belum evaluasi atas kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan sehingga tidak dapat dipetakan kelebihan dan kelemahan atas kegiatan yang telah dijalankan, dan belum ada melakukan koreksi atas penyimpangan yang ditemui selama pelaksanaan kegiatan sosialisasi.



Hasil wawancara dengan Maini Asna selaku Kepala Dinas PPPA Kota

Dumai diperoleh informasi bahwa:

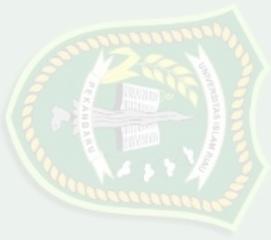
Standar pengawasan yang ditetapkan dalam pelaksanaan program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yakni melalui UPT PPPA yang langsung terjun ke lapangan mengawasi hal-hal tersebut. Pelaporannya berupa presentasikan di hadapan atasan, lalu membuat laporan beserta dokumen-dokumennya. Bentuk evaluasi kegiatan dengan mengadakan monitoring dan evaluasi sekali setahun dari program kegiatan yang dilakukan selama 1 tahun (Hasil wawancara pada tanggal 05 Agustus 2022)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa dalam melaksanakan pengawasan atau pengendalian kegiatan sosialisasi pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak telah ditetapkan standar pengawasan. Adapun standar pengawasan kegiatan berupa terjun ke lapangan mengawasi hal-hal tersebut. Pelaporannya berupa presentasikan di hadapan atasan, lalu membuat laporan beserta dokumen-dokumennya. Bentuk evaluasi kegiatan dengan mengadakan monitoring dan evaluasi sekali setahun dari program kegiatan yang dilakukan selama 1 tahun.

Sementara dari hasil wawancara dengan Irfan Wahyudi selaku Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan diperoleh informasi sebagai berikut:

Standar pengawasan yang ditetapkan dalam pelaksanaan program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak berupa penyusunan peta resiko, lalu membuat laporan kegiatan. Pada saat kegiatan temuan yang sering terjadi peserta tidak hadir dan narasumber berhalangan hadir (Wawancara pada tanggal 09 Agustus 2022)

Tanggapan yang disampaikan kepala DPPPA Kota Dumai dan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan di atas, sangat jelas menggambarkan bahwa dalam pelaksanaan sosialisasi kegiatan telah ditetapkan standar pengawasan atas



kegiatan dengan menetapkan pelaksanaannya yakni UPT PPPA dan membuat laporan atas semua aktivitas sosialisasi yang dilakukan lalu mengevaluasi untuk perbaikan pada masa mendatang. Langkah-langkah yang telah dilaksanakan ini sebagai bentuk pengendalian atas kegiatan agar kegiatan sosialisasi pada masa mendatang menjadi semakin baik dan terus berbenah sesuai dengan keadaan.

Hasil observasi atau pengamatan lapangan terlihat bahwa dalam pelaksanaan sosialisasi telah dilakukan dokumentasi berupa aktivitas kegiatan dan disusun peta resiko agar memudahkan penanggulangannya. Kemudian telah ada evaluasi yang dilakukan setiap akhir tahun sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan kegiatan pada masa mendatang.

Menurut Hamim (2013) pengawasan atau pengendalian kegiatan merupakan langkah yang dilakukan untuk mengontrol kegiatan atas program yang dilaksanakan melalui rencana pengawasan, pelaporan, evaluasi, dan koreksi atas penyimpangan. Berdasarkan dari tanggapan responden, wawancara, dan observasi lalu disandingkan dengan teori yang digunakan, maka dapat dikatakan seluruh aktivitas pengawasan atau pengendalian kegiatan telah dijalankan Dinas P3A Kota Dumai dalam sosialisasi kegiatan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dengan demikian dari hasil tanggapan responden (pegawai DPPP) maupun dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan jelaslah bahwa indikator pengawasan (pengendalian kegiatan) dalam pelaksanaan sosialisasi kegiatan program pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Dumai sudah terlaksana sebagaimana diharapkan.



Tabel 5.11 Rekapitulasi Tanggapan Responden (Pegawai)

No.	Pertanyaan	Kriteria Pilihan Jawaban						Jumlah
		Terlaksana		Cukup Terlaksana		Kurang Terlaksana		
		F	%	F	%	F	%	
1	Rumusan rencana kegiatan	4	80%	1	20%	-	-	5
2	Pelaksanaan kegiatan	2	40%	3	60%	-	-	5
3	Pengawasan (pengendalian kegiatan)	2	40%	3	60%	-	-	5
Jumlah		8		7		-		15
Rata-rata		3		2		-		5
Persentase		60%		40%		-		100%
Kategori		Cukup Terlaksana						

Sumber: Data Penelitian, 2022.

Berdasarkan data yang tertuang pada tabel diatas dari hasil tanggapan yang disampaikan pegawai DPPP mengenai pelaksanaan sosialisasi kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Dumai secara keseluruhan telah terlaksana. Di mana terdapat sebanyak 60% mengatakan sosialisasi program kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak terlaksana, dan hanya 40% mengatakan cukup terlaksana. Hasil ini berasal dari 3 indikator yang menjadi tolak ukur yakni rumusan rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan (pengendalian kegiatan) sudah berjalan sebagaimana diharapkan.

Sebelum menetapkan kesimpulan hasil penelitian ini, maka tanggapan yang disampaikan pegawai belum bisa dijadikan tolak ukurnya. Untuk itu peneliti menguraikan juga hasil tanggapan secara keseluruhan dari responden (masyarakat) Kota Dumai atas pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang telah



dijalankan dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.12 Rekapitulasi Tanggapan Responden (Peserta)

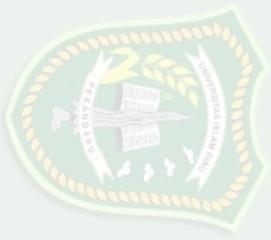
No.	Pertanyaan	Kriteria Pilihan Jawaban						Jumlah
		Terlaksana		Cukup Terlaksana		Kurang Terlaksana		
		F	%	F	%	F	%	
1	Rumusan rencana kegiatan	5	27,8%	9	50%	4	22,2%	18
2	Pelaksanaan kegiatan	6	33,3%	8	44,5%	4	22,2%	18
3	Pengawasan (pengendalian kegiatan)	3	16,7%	9	50%	6	33,3%	18
Jumlah		14		26		14		54
Rata-rata		5		8		5		18
Persentase		27,8%		44,4%		27,8%		100%
Kategori		Cukup Terlaksana						

Sumber: Data Penelitian, 2022.

Berdasarkan data yang tertuang pada tabel diatas dari hasil tanggapan yang disampaikan masyarakat Kota Dumai mengenai pelaksanaan sosialisasi kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Dumai secara keseluruhan cukup terlaksana. Hasil ini berasal dari 3 indikator yang menjadi tolak ukur yakni rumusan rencana kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan, serta pengawasan (pengendalian kegiatan) sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang telah dijalankan DPPPA Kota Dumai.

Hasil wawancara dengan Maini Asna selaku Kepala Dinas PPPA Kota Dumai diperoleh informasi bahwa:

Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak berupa anggaran yang minim, sehingga kegiatan tersebut tidak perfect dilakukan (Hasil wawancara pada tanggal 05 Agustus 2022)



Sementara dari hasil wawancara dengan Irfan Wahyudi selaku Kepala

Bidang Perlindungan Hak Perempuan diperoleh informasi sebagai berikut:

Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sering kali terjadi peserta tidak hadir dan tempat tidak ada (Wawancara pada tanggal 09 Agustus 2022)

Dengan demikian dari paparan data yang telah didistribusikan pada tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan sosialisasi program kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh DPPPA Kota Dumai secara keseluruhan berada pada kategori cukup terlaksana. Hasil ini jelas menggambarkan bahwa DPPPA Kota Dumai telah merumuskan rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan (pengendalian kegiatan) seluruhnya telah dijalankan dengan kategori cukup terlaksana.

Ada beberapa hambatan yang masih menjadi kendala untuk mencapai pelaksanaan kegiatan yang diharapkan yakni berupa anggaran yang tersedia untuk kegiatan sangat minim dan sering kali terjadi ketidakhadiran peserta maupun narasumber dalam setiap sosialisasi kegiatan. Metode sosialisasi yang digunakan berupa metode ceramah tidak dialogis, sehingga membuat peserta menjadi bosan dan kurang memahami isi materi. Selain itu belum ada pemanfaatan media komunikasi untuk kegiatan sosialisasi seperti media sosial facebook, instagram, youtube, maupun media konvensional seperti banner, famplet dan sebagainya untuk mendekatkan informasi kepada masyarakat.

Pada kegiatan sosialisasi telah dibentuk tim khusus sebagai pelaksanaanya, tetapi komunikasi dan koordinasi dalam setiap kegiatan belum berjalan maksimal sebagaimana diharapkan, sehingga pada saat kegiatan sosialisasi beberapa kali



waktu dan tempat berubah dikarenakan kurangnya koordinasi. Selain itu beberapa kali pemakalah atau pemberi materi dan peserta tidak hadir dalam kegiatan sosialisasi dikarenakan kurangnya komunikasi dan koordinasi yang dijalankan DP3A Kota Dumai. Hal-hal ini menjadi indikasi kegiatan yang dilaksanakan kurang berjalan dengan maksimal, sehingga hasil yang dicapai tidak seperti yang diharapkan.

Selama melaksanakan kegiatan sosialisasi pada program perlindungan terhadap perempuan dan anak belum ditetapkan standar pengawasan yang jelas untuk mengukur suatu program kerja. Kemudian tidak ada dilaksanakan evaluasi atas program kerja yang dijalankan, yang ada hanya pembuatan laporan kegiatan setiap tahunnya tanpa ada evaluasi atas kelebihan, kekurangan, ataupun peluang yang bisa dimanfaatkan untuk masa mendatang. Dengan demikian jelaslah bahwa pelaksanaan sosialisasi program kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh DPPPA Kota Dumai secara keseluruhan berada pada kategori cukup terlaksana.

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi program kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh DPPPA Kota Dumai secara keseluruhan berada pada kategori cukup terlaksana. Hasil ini jelas menggambarkan bahwa DPPPA Kota Dumai dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan alokasi anggaran yang minim jumlahnya, sehingga menyebabkan durasi sosialisasi menjadi terbatas dan tempat sosialisasi yang sebatas di perkotaan saja. Sedangkan pada saat sosialisasi DP3A menggunakan metode ceramah dan tidak memanfaatkan media lainnya untuk mendukung sosialisasi, sehingga sosialisasi menjadi kaku dan membosankan membuat peserta kurang memahami isi materinya. Komunikasi dan koordinasi dalam kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan DP3A masih belum berjalan baik, sehingga beberapa kali terjadi pemateri tidak hadir pada kegiatan dan juga peserta tidak mengetahui tempat dan waktu sosialisasi, sehingga kegiatan sosialisasi tidak dihadiri pemateri maupun peserta dan menyebabkan kegiatan sosialisasi tidak berjalan. Belum ada ditetapkan standar pengawasan atas kegiatan sosialisasi, tidak ada evaluasi yang dilakukan sehingga tidak dapat dipetakan kelebihan dan kekurangan dari kegiatan sosialisais yang telah dijalani tersebut. Dengan demikian pelaksanaan kegiatan sosialisasi masih terdapat kendala, sehingga pelaksanaannya



belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan berupa tereduksinya masyarakat dan menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Dumai.

5.2. Saran

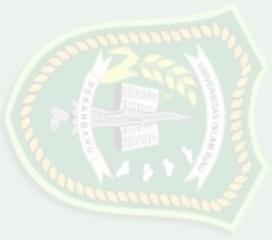
Adapun saran penelitian yang ingin penulis sampaikan dalam bentuk perbaikan dalam pelaksanaan sosialisasi program kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai berikut:

1. Hendaknya Pemerintah Kota Dumai mengalokasikan anggaran sesuai dengan yang diusulkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terutama dalam alokasi kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan.
2. Hendaknya DPPPA Kota Dumai mempersiapkan tempat dan waktu serta narasumber pada setiap kegiatan yang disampaikan secara jelas, sehingga masyarakat bisa menghadiri dan sebagai pusat edukasi bagi masyarakat. Kemudian kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan secara terus menerus dan konsisten dari segi waktu, tempat, dan pematernya.
3. Hendaknya kepada masyarakat turut berperan lebih aktif dalam mengikuti kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga tindak kekerasan dapat dikurangi.
4. Bagi masyarakat yang pernah menjadi korban kekerasan hendaknya mau menjadi narasumber, sehingga setiap sosialisasi kegiatan bisa menghadirkan fakta yang dijadikan pedoman bagi masyarakat.

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU

DAFTAR PUSTAKA

- Andri, Hendry dan Tarmizi Yussa, 2015. "*Prilaku dan Etika Administras ipublik*". Pekanbaru-Riau: Universitas Islam Riau. https://scholar.google.com/scholar?q=related:hpcpcPhYMQJ:scholar.google.com/&scioq=hendry+andry+perilaku+dan+etika+administrasi+publik&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&u=%23p%3D_hpcpcPhYMQJ
- Asrawarta Hendi & Lilis Suriani. "*Analisis Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKEMAS) Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu*". 2017 <https://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP/article/download/3574/1869>
- Ayuningtyas Lintang dan Mohamad Tohir. "*Perencanaan Promosi Sosialisasi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Oleh DP2KBP3A*". 2020 <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/artdesign/article/download/14136/13875>
- Christi Silap, Ventje Kasenda & Neni Kumayas. "*Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Manado*". 2019 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/26217>
- Dirk John P. "*Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya*". 2010 <https://fhukum.unpatti.ac.id/download/jurnal-paper/sasi/Jurnal%20SASI%20vol%2016%20no%203%20Juli%20-%20September%202010/DAMPAK%20TINDAK%20KEKERASAN...%20J.%20D.%20Pasalbessy.pdf>
- Hamim Sufian. "*Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*". Uir Press: 2005 <https://repository.uir.ac.id/5645/1/17.%20SISTEM%20PERENCANAA%20STRATEGIS%20DALAM%20PEMBANGUNAN.pdf>
- Iriawan Beddy M. "*Dasar-Dasar Administrasi Publik*". Kota Depok. 16956 https://scholar.google.com/scholar?cluster=17359291571023605157&hl=id&as_sdt=2005&scioldt=0,5&scioq=beddy+iriawan+maksudi+dasar+dasar+administrasi#d=gs_qabs&u=%23p%3DpW1L27WX6PAJ
- Lalu Ulung Ilham & Novia Suhastini. "*Efektivitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat*". Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/JSIP/article/view/941/809>



Muclis, Indra A dan Sufian Hamim."Administrasi dan Manajemen Pembangunan".TrussmediaGrafika:2012.<https://repository.uir.ac.id/5662/1/13.%20ADMINISTRASI%20DAN%20MANAJEMEN%20PEMBANGUNAN%2C%20KONSEP%2C%20PENDEKATAN%2C%20TEORI%20DAN%20APLIKASI%20DI%20INDONESIA.pdf>

Muclis, Indra A dan Sufian Hamim, S.H., M.Si.."Administrasi, Organisasi&Manajemen".TrussmediaGrafika:2013http://repository.unisi.ac.id/80/1/Binder_06-dikompresi.pdf

Mukarom Zainal dan Muhibudin Wijaya Laksana."Manajemen Pelayanan Publik".CV.PustakaSetia,Bandung-40253http://digilib.uinsgd.ac.id/4264/1/ZM_Manajemen_Pelayanan_Publik.pdf

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai.https://jdih.go.id/files/309/12_prd_2016.pdf

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.file:///C:/Users/TOSHIBA%20L745/Downloads/4_perda_2016.pdf

StillmanRichard J. danSufian Hamim."Administrasi Negara (Konsep dan Kasus)".UIRPRESS:2005.<https://repository.uir.ac.id/5663/1/14.%20ADMINISTRASI%20NEGARA%2C%20KONSEP%20DAN%20KASUS.pdf>

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang kekerasan<file:///C:/Users/TOSHIBA%20L745/Downloads/UU%20Nomor%2035%20Tahun%202014.pdf>

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU



Lampiran 1

KUESIONER PENELITIAN

Tentang

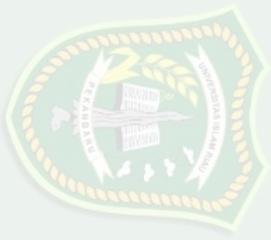
**PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SOSIALISASI
PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK DI DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI**

PENELITI

**KIKI DIAN PERLINA
NPM : 187110386**

**UNIVERSITAS
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022
ISLAM RIAU**

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :
PERPUSTAKAAN SOEMAN HS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU



SURAT PENGANTAR KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth.

Bapak/Ibu
**Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Dumai**

di

Tempat

Dengan hormat,

Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam penyelesaian pendidikan pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, sebagai bahan penulisan skripsi kami melaksanakan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI”**.

Sehubungan dengan itu, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu, untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan petunjuk pengisiannya. Perlu kami sampaikan bahwa hasil penelitian ini hanya untuk kepentingan akademik dan tidak akan berpengaruh pada status dan pekerjaan ataupun jabatan Bapak/Ibu.

Bantuan dari Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini dengan sejujur-jujurnya, secara obyektif, dan apa adanya sangat berarti bagi penelitian ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Peneliti,

Kiki Dian Perlina
NPM: 187110386

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



Nomor Responden:

--	--

**Diisi Oleh Peneliti*

QUESTIONER PENELITIAN

(PEGAWAI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI)

PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

A. Identitas Peneliti

Nama : Kiki Dian Perlina
 NPM : 187110386
 Program Studi : Administrasi Publik
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau

B. Identitas Responden

Nama :

Jenis Kelamin : a). Laki-laki b). Perempuan

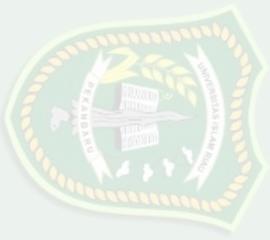
Umur :Tahun

Pendidikan Terakhir : a). Sarjana S-2 b). Sarjana S-1
 c). Diploma d). SMA/SMK/MA
 e). SMP/Sederajat e). SD

Jabatan :

C. Petunjuk :

1. Angket Penelitian ini hanya dimaksudkan semata-mata untuk penelitian skripsi yang ilmiah, tidak merugikan siapapun. Oleh karena itu diharapkan kepada Bapak/Ibu dapat memberikan informasi yang jujur dan aktual serta apa adanya.
2. Identitas Bapak/Ibu sebagai Responden terjamin kerahasiaannya



3. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Penulis dan pihak terkait.
4. Atas kerja sama dan bantuan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih

D. Cara Pengisian

1. Bacalah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan benar
2. Berilah tanda silang (X) pada setiap jawaban yang terpilih
3. Jawablah pertanyaan dengan sejujur-jujurnya.

E. Daftar Pertanyaan

Berilah tanda (x) atau (√) pada jawaban yang dianggap paling sesuai dengan fakta yang ada.

I. Rumusan Rencana Kegiatan

1. Apakah program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak telah memiliki kejelasan perumusan tujuan?
 - a. Terlaksana
 - b. Cukup terlaksana
 - c. Kurang terlaksana

Jelaskan:

.....

.....

.....

2. Apakah dalam program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak telah ditetapkan pelaksana dan sasaran yang hendak dicapai?
 - a. Terlaksana
 - b. Cukup terlaksana
 - c. Kurang terlaksana

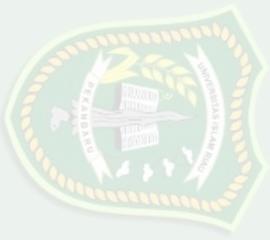
Jelaskan:

.....

.....

.....

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



3. Apakah program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak telah ditetapkan kejelasan tempat kegiatan?

- a. Terlaksana b. Cukup terlaksana c. Kurang terlaksana

Jelaskan:

.....

.....

.....

4. Apakah program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak telah memiliki kejelasan waktu kegiatan?

- a. Terlaksana b. Cukup terlaksana c. Kurang terlaksana

Jelaskan:

.....

.....

.....

5. Apakah program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak telah memiliki kejelasan anggaran kegiatan?

- a. Terlaksana b. Cukup terlaksana c. Kurang terlaksana

Jelaskan:

.....

.....

.....

6. Apakah program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak telah memiliki kejelasan metode dan prosedur dalam pelaksanaannya?

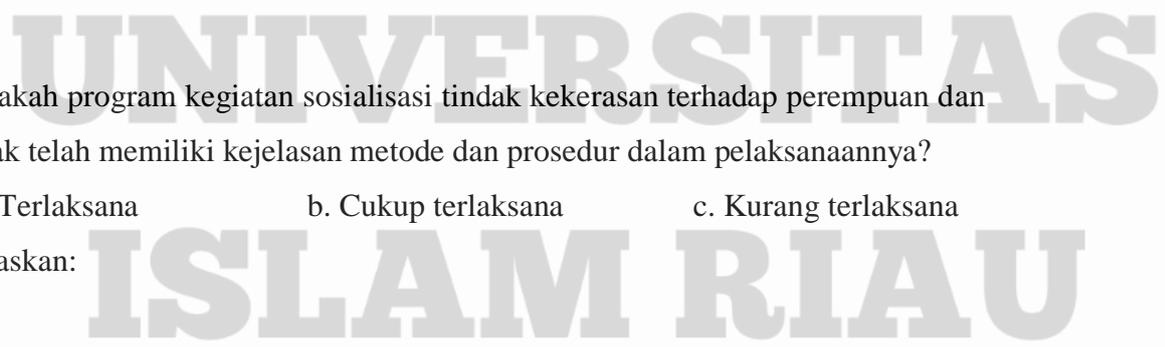
- a. Terlaksana b. Cukup terlaksana c. Kurang terlaksana

Jelaskan:

.....

.....

.....

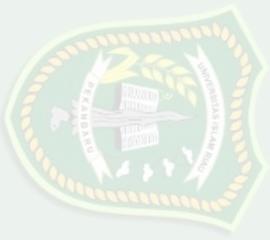


DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK:

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin



.....

.....

.....

II. Pelaksanaan Kegiatan

7. Apakah telah ditetapkan struktur dan tupoksi tim dalam pelaksanaan program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Dumai?

- a. Terlaksana b. Cukup terlaksana c. Kurang terlaksana

Jelaskan:

.....

.....

.....

8. Apakah telah ditetapkan kepemimpinan tim pada pelaksanaan program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Dumai?

- a. Terlaksana b. Cukup terlaksana c. Kurang terlaksana

Jelaskan:

.....

.....

.....

9. Apakah sudah berjalan komunikasi dalam tim pada pelaksanaan program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Dumai?

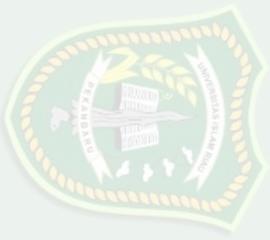
- a. Terlaksana b. Cukup terlaksana c. Kurang terlaksana

Jelaskan:

.....

.....

.....



.....

.....

.....

10. Apakah telah ada koordinasi tim dalam pelaksanaan program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Dumai?

- a. Terlaksana b. Cukup terlaksana c. Kurang terlaksana

Jelaskan:

.....

.....

.....

III. Pengawasan (Pengendalian Kegiatan)

11. Apakah telah ditetapkan standar (rencana) pengawasan dalam pelaksanaan program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Dumai?

- a. Terlaksana b. Cukup terlaksana c. Kurang terlaksana

Jelaskan:

.....

.....

.....

12. Apakah telah ada pelaporan kegiatan (laporan kemajuan kegiatan) dalam pelaksanaan program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Dumai?

- a. Terlaksana b. Cukup terlaksana c. Kurang terlaksana

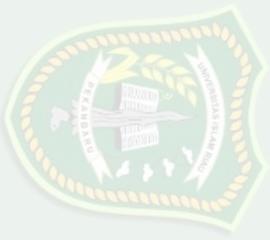
Jelaskan:

.....

.....

.....

ISLAM RIAU



.....

.....

.....

13. Apakah telah ada evaluasi kegiatan dalam pelaksanaan program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Dumai?

- a. Terlaksana b. Cukup terlaksana c. Kurang terlaksana

Jelaskan:

.....

.....

.....

14. Apakah telah ada koreksi penyimpangan dalam pelaksanaan program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Dumai?

- a. Terlaksana b. Cukup terlaksana c. Kurang terlaksana

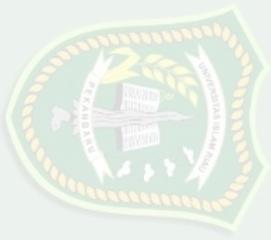
Jelaskan:

.....

.....

.....

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



SURAT PENGANTAR KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth.

Bapak/Ibu
Masyarakat Kota Dumai

di
Tempat

Dengan hormat,

Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam penyelesaian pendidikan pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, sebagai bahan penulisan skripsi kami melaksanakan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI”**.

Sehubungan dengan itu, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu, untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan petunjuk pengisiannya. Perlu kami sampaikan bahwa hasil penelitian ini hanya untuk kepentingan akademik dan tidak akan berpengaruh pada status dan pekerjaan ataupun jabatan Bapak/Ibu.

Bantuan dari Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini dengan sejujurnya, secara obyektif, dan apa adanya sangat berarti bagi penelitian ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Peneliti,

Kiki Dian Perlina
NPM: 187110386

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU



Nomor Responden:

--	--

**Diisi Oleh Peneliti*

QUESTIONER PENELITIAN

(MASYARAKAT KOTA DUMAI)

PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

A. Identitas Peneliti

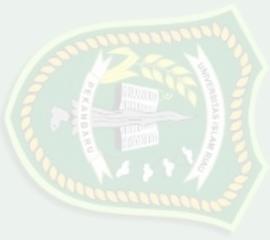
Nama : Kiki Dian Perlina
NPM : 187110386
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau

B. Identitas Responden

Nama :
Jenis Kelamin : a). Laki-laki b). Perempuan
Umur :Tahun
Pendidikan Terakhir : a). Sarjana S-2 b). Sarjana S-1
c). Diploma d). SMA/SMK/MA
e). SMP/Sederajat e). SD
Pekerjaan :
Jenis Kasus Kekerasan :

C. Petunjuk :

1. Angket Penelitian ini hanya dimaksudkan semata-mata untuk penelitian skripsi yang ilmiah, tidak merugikan siapapun. Oleh karena itu diharapkan



kepada Bapak/Ibu dapat memberikan informasi yang jujur dan aktual serta apa adanya.

2. Identitas Bapak/Ibu sebagai Responden terjamin kerahasiaannya
3. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Penulis dan pihak terkait.
4. Atas kerja sama dan bantuan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih

D. Cara Pengisian

1. Bacalah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan benar
2. Berilah tanda silang (X) pada setiap jawaban yang terpilih
3. Jawablah pertanyaan dengan sejujur-jujurnya.

E. Daftar Pertanyaan

Berilah tanda (x) atau (√) pada jawaban yang dianggap paling sesuai dengan fakta yang ada.

I. Rumusan Rencana Kegiatan

1. Apakah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai telah menyampaikan tujuan kepada Bapak/Ibu atas program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak?

- a. Terlaksana b. Cukup terlaksana c. Kurang terlaksana

Jelaskan:

.....

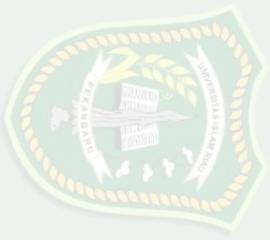
.....

.....

2. Apakah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai telah menetapkan pegawai khusus yang mendatangi Bapak/Ibu untuk menyampaikan program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak?

- a. Terlaksana b. Cukup terlaksana c. Kurang terlaksana

ISLAM RIAU



Jelaskan:

.....
.....
.....

3. Apakah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai menyampaikan tempat/lokasi kegiatan kepada Bapak/Ibu untuk program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak?

- a. Terlaksana b. Cukup terlaksana c. Kurang terlaksana

Jelaskan:

.....
.....
.....

4. Apakah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai telah menyampaikan waktu pelaksanaan kegiatan kepada Bapak/Ibu atas program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak?

- a. Terlaksana b. Cukup terlaksana c. Kurang terlaksana

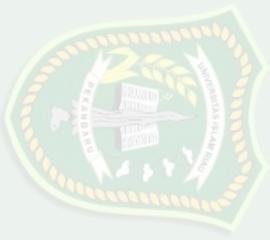
Jelaskan:

.....
.....
.....

II. Pelaksanaan Kegiatan

6. Apakah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai telah menunjukan ketua tim kegiatan atas program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak?

- a. Terlaksana b. Cukup terlaksana c. Kurang terlaksana



Jelaskan:

.....
.....
.....

7. Apakah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai telah menjalin komunikasi dengan Bapak/Ibu atas program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak?

- a. Terlaksana
- b. Cukup terlaksana
- c. Kurang terlaksana

Jelaskan:

.....
.....
.....

8. Apakah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai telah menjalin koordinasi dengan Bapak/Ibu atas pelaksanaan program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak?

- a. Terlaksana
- b. Cukup terlaksana
- c. Kurang terlaksana

Jelaskan:

.....
.....
.....

UNIVERSITAS ISLAM RIAU



Lampiran 2

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Tentang

**PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SOSIALISASI
PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK DI DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI**

PENELITI

**KIKI DIAN PERLINA
NPM : 187110386**

**UNIVERSITAS
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022
ISLAM RIAU**

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU



SURAT PENGANTAR WAWANCARA PENELITIAN

Kepada Yth.

**Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Dumai**

di

Tempat

Dengan hormat,

Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam penyelesaian pendidikan pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, sebagai bahan penulisan skripsi kami melaksanakan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI”**.

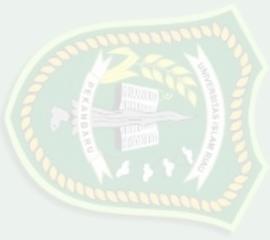
Sehubungan dengan itu, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu, untuk memberikan tanggapan wawancara ini sesuai dengan fakta yang ada. Perlu kami sampaikan bahwa hasil penelitian ini hanya untuk kepentingan akademik dan tidak akan berpengaruh pada status pekerjaan atau jabatan Bapak/Ibu sebagai ASN/PNS Pemko Dumai.

Terima kasih atas bantuan dari Bapak/Ibu dalam memberikan informasi dengan sejujur-jujurnya, secara obyektif, dan apa adanya sangat berarti bagi penelitian ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Peneliti,

**Kiki Dian Perlina
NPM: 187110386**

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



**PERTANYAAN WAWANCARA
(Kepala Dinas dan Kepala Bidang)**

**PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN
TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KOTA DUMAI**

A. Identitas Key Informan

Nama :

Jenis Kelamin : a). Laki-laki b). Perempuan

Umur :Tahun

Pendidikan Terakhir : a). Sarjana S-2 b). Sarjana S-1
c). Diploma d). SMA/SMK/MA

Jabatan :

Tanggal Wawancara :

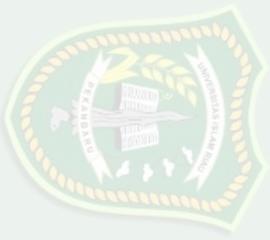
B. Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apasaja tujuan dari program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak?

.....
.....
.....

2. Siapa saja yang ditetapkan sebagai pelaksana program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak?

ISLAM RIAU



.....

.....

.....

3. Dimana saja tempat pelaksanaan program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang telah ditetapkan?

.....

.....

.....

4. Kapan waktu pelaksanaan program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak?

.....

.....

.....

5. Berapa anggaran biaya yang ditetapkan pada program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak?

.....

.....

.....

6. Apasaja bentuk metode dan prosedur yang ditetapkan atas program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak?

.....

.....

.....

UNIVERSITAS

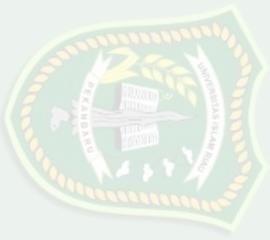
ISLAM RIAU

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin



7. Apasaja struktur organisasi dan tupoksi tim pelaksana program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak?

.....
.....
.....

8. Siapa dan berapa orang yang terlibat sebagai pemimpin dalam program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak?

.....
.....
.....

9. Bagaimana pola komunikasi tim pada pelaksanaan program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak?

.....
.....
.....

10. Bagaimana pola koordinasi tim yang telah dibentuk dalam pelaksanaan program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak?

.....
.....
.....

11. Apasaja standar pengawasan yang ditetapkan dalam pelaksanaan program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak?

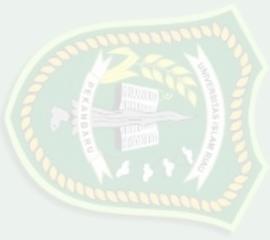
.....
.....
.....

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU



.....
.....
.....

12. Bagaimana bentuk pelaporan atau pertanggungjawaban atas pelaksanaan program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak?

.....
.....
.....

13. Apasaja bentuk evaluasi kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak?

.....
.....
.....

14. Apasaja temuan atas koreksi penyimpangan untuk perbaikan dalam pelaksanaan program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak?

.....
.....
.....

15. Apasaja hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak?

.....
.....

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK:

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin



Lampiran 3

REKAPITULASI TANGGAPAN RESPONDEN

PEGAWAI DP2PA KOTA DUMAI

No. Resp	Identitas			Tanggapan													
	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Rumusan Rencana Kegiatan						Pelaksanaan Kegiatan				Pengawasan (Pengendalian Kegiatan)			
				1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	1	2	3	4
1	P	43	S-2	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	A	B	A
2	P	44	S-1	A	A	A	A	A	A	A	B	A	B	B	A	B	A
3	P	48	S-1	A	B	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A
4	L	52	S-2	B	A	B	B	A	B	A	A	A	A	B	A	B	B
5	P	45	S-2	A	A	A	B	B	A	B	A	A	A	A	B	A	B

MASYARAKAT

NoR esp	Identitas				Tanggapan													
	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Rumusan Rencana Kegiatan						Pelaksanaan Kegiatan				Pengawasan (Pengendalian Kegiatan)			
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	1	2	3	4
1	P	19	SMA	Mahasiswa	B	B	B	B	A	A	A	B	B	B	B	A	A	A
2	L	11	SMP	Pelajar	A	C	A	B	B	B	B	A	C	A	B	B	B	B
3	P	15	SMP	Pelajar	A	A	B	C	C	B	A	A	A	B	C	C	B	A
4	P	36	SD	IRT	B	C	B	B	B	A	B	B	C	B	B	B	A	B
5	P	35	SMA	IRT	A	A	C	A	A	B	B	A	A	C	A	A	B	B
6	P	44	SMA	IRT	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A	B	B	B	A
7	L	17	SMA	Pelajar	B	B	A	A	C	A	B	B	B	A	A	C	A	B
8	P	53	SMA	IRT	A	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	A	A	A
9	L	16	SMP	Pelajar	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	B	A	A
10	P	28	SMP	IRT	A	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	A	A	A
11	P	25	SMA	Karyawan	B	A	C	B	C	B	B	B	A	C	B	C	B	B
12	P	33	SMA	Wiraswasta	B	B	C	C	B	B	C	B	B	C	C	B	B	C
13	P	13	SD	Pelajar	B	C	C	C	C	A	B	B	C	C	C	C	A	B
14	P	16	SMP	Pelajar	B	C	C	C	A	A	B	B	C	C	C	A	A	B
15	P	37	SD	Buruh	B	B	B	B	B	A	C	B	B	B	B	B	A	C
16	P	41	SMA	IRT	B	B	B	B	B	A	B	B	B	B	B	B	A	B
17	P	41	SMA	IRT	B	B	B	B	C	B	B	B	B	B	B	C	B	B
18	P	21	SMP	IRT	A	A	B	C	C	B	B	A	A	B	C	C	B	B



Lampiran 4

TANGGAPAN WAWANCARA

A. Identitas Key Informan

Nama : Maini Asna, SKM., M.Si
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 54 Tahun
Pendidikan Terakhir : Sarjana S-2
Jabatan : Kepala Dinas PPPA Kota Dumai
Tanggal Wawancara : 05 Agustus 2022

B. Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apasaja tujuan dari program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak?
Agar masyarakat tahu tempat pengaduan kalau terjadi masalah yaitu di UPT PPPA (PKM). Mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Siapa saja yang ditetapkan sebagai pelaksana program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak?
Kadis, Kabid, Fungsional (analisis kebijakan) serta staf dibidang PHP (Perlindungan Hak Perempuan)
3. Dimana saja tempat pelaksanaan program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang telah ditetapkan?
Di kecamatan dan kelurahan. Di PKK, GOW (Gabungan Organisasi Wanita), dan lainnya.



4. Kapan waktu pelaksanaan program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak?

Dari bulan Januari sampai Desember (dibagi per triwulan)

5. Berapa anggaran biaya yang ditetapkan pada program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak?

Rp. 15 Juta dari APBD dan Rp. 235 Juta dari APBN

6. Apasaja bentuk metode dan prosedur yang ditetapkan atas program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak?

Sosialisasi, Bimtek untuk satgas duli empak. Memuat kampung duliempak (tiap kecamatan hanya 1 percontohan)

7. Apasaja struktur organisasi dan tupoksi tim pelaksana program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak?

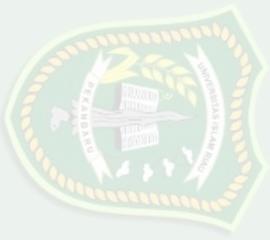
.....
.....
.....

8. Siapa dan berapa orang yang terlibat sebagai pemimpin dalam program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak?

Kepala Dinas, Kepala Bidang, Fungsional (analisis kebijakan) serta 1 orang staf jumlahnya 6 orang dari kantor DPPPA.

9. Bagaimana pola komunikasi tim pada pelaksanaan program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak?

Dengan komunikasi langsung dengan audience (menjadi pendengar dan adanya tanya jawab) menggunakan slit power point.



10. Bagaimana pola koordinasi tim yang telah dibentuk dalam pelaksanaan program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak?

Kalau ada kasus (masalah) tentang kekerasan, satuan tugas/satgas bisa langsung ke UPT PPPA Kota Dumai.

11. Apasaja standar pengawasan yang ditetapkan dalam pelaksanaan program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak?

Melalui UPT PPPA yang langsung terjun ke lapangan mengawasi hal-hal tersebut.

12. Bagaimana bentuk pelaporan atau pertanggungjawaban atas pelaksanaan program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak?

Dipresentasikan dihadapan atasan, lalu membuat laporan beserta dokumen-dokumennya

13. Apasaja bentuk evaluasi kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak?

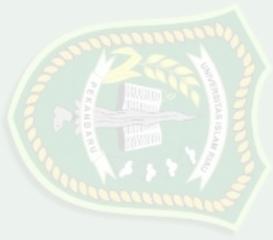
Kita mengadakan Monitoring dan evaluasi sekali setahun dari program kegiatan yang dilakukan selama 1 tahun.

14. Apasaja temuan atas koreksi penyimpangan untuk perbaikan dalam pelaksanaan program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak?

Tidak ada temuan

15. Apasaja hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak?

Anggaran yang minim, sehingga kegiatan tersebut tidak perfect dilakukan.



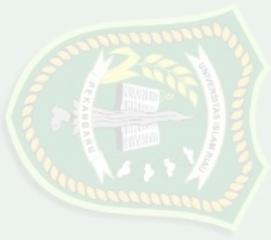
TANGGAPAN WAWANCARA

A. Identitas Key Informan

Nama : Irfan Wahyudi, SKM., M.Kes
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 43 Tahun
Pendidikan Terakhir : Sarjana S-2
Jabatan : Kabid Perlindungan Hak Perempuan
Tanggal Wawancara : 29 Agustus 2022

B. Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apasaja tujuan dari program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak?
Meningkatkan pemahaman persepsi masyarakat tentang sosialisasi kekerasan perempuan dan anak. Meningkatkan pengetahuan tentang pencegahan kekerasan perempuan dan anak.
2. Siapa saja yang ditetapkan sebagai pelaksana program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak?
Bidang terkait dan lintas bidang serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
3. Dimana saja tempat pelaksanaan program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang telah ditetapkan?
Di Kelurahan, tempat perwiridan, di tempat strategis lainnya, dan setiap perkumpulan warga.



4. Kapan waktu pelaksanaan program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak?

Sesuai dengan program yang telah ditentukan

5. Berapa anggaran biaya yang ditetapkan pada program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak?

Sesuai dengan anggaran yang disahkan

6. Apasaja bentuk metode dan prosedur yang ditetapkan atas program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak?

Metode tanya jawab, banner, leaflet, dan baleho luar.

7. Apasaja struktur organisasi dan tupoksi tim pelaksana program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak?

Kepala Dinas, Kepala Bidang, dan Kasi, serta staf bidang

8. Siapa dan berapa orang yang terlibat sebagai pemimpin dalam program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak?

1 orang pemimpin yakni kepala bidang

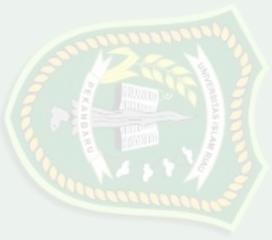
9. Bagaimana pola komunikasi tim pada pelaksanaan program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak?

Melalui komunikasi via telepon

10. Bagaimana pola koordinasi tim yang telah dibentuk dalam pelaksanaan program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak?

Rapat persiapan, rapat pelaksanaan, dan rapat Monitoring dan evaluasi.

11. Apasaja standar pengawasan yang ditetapkan dalam pelaksanaan program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak?



Penyusunan Peta resiko

12. Bagaimana bentuk pelaporan atau pertanggungjawaban atas pelaksanaan program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak?

Laporan kegiatan

13. Apasaja bentuk evaluasi kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak?

Lomba adm satgas PKDRT

14. Apasaja temuan atas koreksi penyimpangan untuk perbaikan dalam pelaksanaan program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak?

Peserta tidak hadir dan narasumber berhalangan hadir

15. Apasaja hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program kegiatan sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak?

Peserta tidak hadir dan tempat tidak ada.

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



Lampiran 5

DOKUMENTASI PENELITIAN



Peneliti Mewawancarai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai



Peneliti Mewawancarai Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan

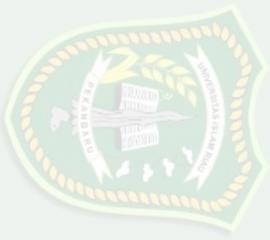
Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

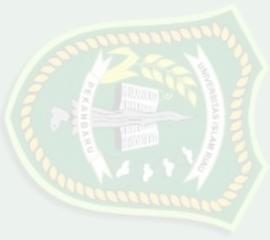


Masyarakat Kota Dumai Mengisi Pertanyaan atas Kuesioner Penelitian yang Peneliti Ajukan



Masyarakat Kota Dumai Mengisi Pertanyaan atas Kuesioner Penelitian yang Peneliti Ajukan

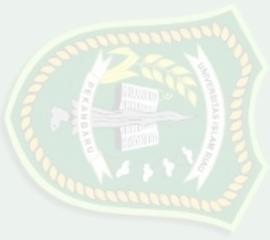
ISLAM RIAU



Masyarakat Kota Dumai Mengisi Pertanyaan atas Kuesioner Penelitian yang Peneliti Ajukan



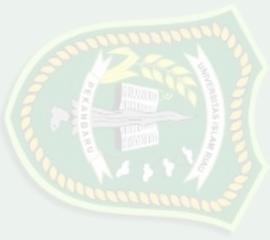
Masyarakat Kota Dumai Mengisi Pertanyaan atas Kuesioner Penelitian yang Peneliti Ajukan



Masyarakat Kota Dumai Mengisi Pertanyaan atas Kuesioner Penelitian yang Peneliti Ajukan



Masyarakat Kota Dumai Mengisi Pertanyaan atas Kuesioner Penelitian yang Peneliti Ajukan



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Dumai Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Program Kerja



Ruang Rapat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 الجامعة الإسلامية الریویة

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284.
 Telp. +62 761 674674 Fax +62 761 674834 Email fslpol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT RISET

Nomor : 768/E-UIR/27-FS/2022

Hal : Mohon Rekomendasi Riset
 Kepada Yth : Bapak / Ibu Pimpinan / Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Di - Tempat

Assalamu'alaikum,Wr,Wb

Dengan hormat, bersama ini datang menghadap Bapak/Ibu, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau atas nama :

Nama : KIKI DIAN PERLINA
 NIM : 187110386
 Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK
 Jenjang Pendidikan : S1
 Semester : VIII
 Alamat : JL. KELAPA SAWIT BLOK B.11

Dengan harapan untuk mendapatkan rekomendasi pelaksanaan penelitian (Penulisan Skripsi) dengan judul :

"Pelaksanaan Program Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai"

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 09 Juni 2022
 an, Dekan



Indra Safri, S.Sos., M.Si
 Wakil Dekan 1

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

**UNIVERSITAS
 ISLAM RIAU**



Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/0
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Nomor : 768/E-UIR/27-FS/2022 Tanggal 9 Juni 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

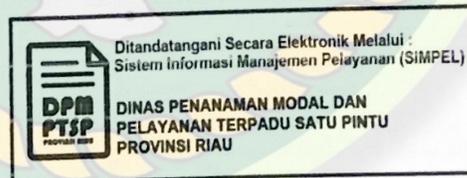
- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | KIKI DIAN PERLINA |
| 2. NIM / KTP | : | 187110386 |
| 3. Program Studi | : | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 13 Juni 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Dumai
 Up. Kakan Kesbangpol dan Linmas di Dumai
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

**UNIVERSITAS
 ISLAM RIAU**



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. H.R. Soebrantas Telp/Fax. (0765) 3122-440360
DUMAI

REKOMENDASI

NOMOR : 0189/SKP/DPMPTSP/VI/2022

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA-RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, berdasarkan surat dari DPMPTSP Pekanbaru - Provinsi Riau Nomor : 503 / DPMPTSP / NON IZIN-RISET /40807 Tanggal 13 Juni 2022 perihal Permohonan Izin Penelitian dengan ini membenarkan rekomendasi yang dimaksud kepada

Nama : **KIKI DIAN PERLINA**
 No. Induk Mahasiswa : 187110386
 Program Studi : Administrasi Publik
 Jenjang : S1
 Alamat : Gg. Tunas Muda Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur
 Nomor Telp : 082386050244

Untuk melakukan Penelitian/Pengumpulan Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai guna dijadikan pengumpulan data untuk Bahan Penelitian dengan Judul

**" PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN
 TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI "**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini
2. Menjaga Tata Tertib dan Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku di daerah setempat
3. Setelah selesai penelitian agar menyampaikan hasilnya kepada kami sebanyak 1 (satu) exemplar

Demikian Surat Rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagai mana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk memberikan kemudahan dan membantu kegiatan Riset ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Dumai
 Pada Tanggal : 30 Juni 2022



Pjh. Kepala
FRIDARSON, SH, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19641005 199303 1 006

**UNIVERSITAS
 ISLAM RIAU**

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl. Putri Tujuh Komplek Rumah Dinas Pemko Dumai

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/DPPPA-SEKR/378

Berdasarkan Surat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor : 4219/E-UIR/27-FS/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Pra Riset mahasiswa/i nya Pada Dinas Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : KIKI DIAN PERLINA
No NIM : 187110386
Semester : VIII
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK

Telah selesai melaksanakan penelitian pada Dinas Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai guna penyusunan skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini disampaikan, dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

KEPALA,

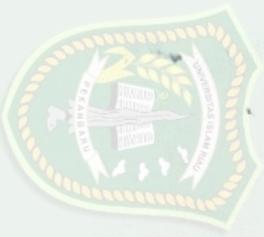
MAINI ASNA, SKM, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680529 198903 2 002

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU



KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1091/UIR-FS/KPTS/2022

TENTANG

TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang

- a. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
- b. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat

1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan

1. Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

1. KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Kiki Dian Perlina
N P M : 187110386
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Kegiatan Sosialisasi Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai

Struktur Tim :

1. Prof. Dr. H. Sufian H. , M.Si. Sebagai Ketua merangkap Penguji
 2. Herman, S.Sos., M.Si. Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
 3. Drs. Parjiyana, M.Si. Sebagai Anggota merangkap Penguji
 4. Andri Kurniawan, B.PM., M.Si. Sebagai Notulen
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas;
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 21 September 2022 M
24 Safar 1444 H
DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU,



DR. SYAMRUL AKMAL LATIF, M.Si
NPK. 080102337

Tembusan :

1. Rektor UIR
2. Ka. Biro Keuangan UIR

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 الجامعة الإسلامية الرiau

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
 Telp. +62761674674 Fax +62761674834 Email. flisipol@uir.ac.id Website www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN JURNAL ONLINE MAHASISWA

Nomor : 2334/A_UIR/5-FS/2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Kiki Dian Perlina
 NPM : 187110386
 Program Studi : Administrasi Publik
 Judul Jurnal : Pelaksanaan Program Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.

Sudah mengunggah dan diterima oleh Editor Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tanggal **01/11/2022**.

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 05/11/2022.

Hormat Kami,
 Wakil Dekan Bid. Akademik

Indra Safri, S.Sos., M.Si
 NPK. 970702230



UNIVERSITAS
ISLAM RIAU

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الرياوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor: 298 /A_UIR/FS-5/2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Kiki Dian Perlina
Npm : 187110386
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.
Persentase Plagiasi : 21 % (86 Halaman)
Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 3 September 2022

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik

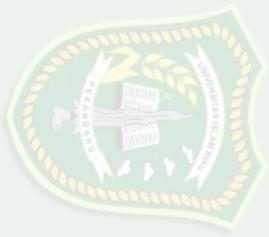

Indra Safri, S.Sos., M.Si
NPK. 970702230

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
LEMBAGA DAKWAH ISLAM KAMPUS (LDIK)

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 6595//LDIK-UIR/2019

Berdasarkan

Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 297/UIR/KPTS/2018
tentang Kewajiban Mahasiswa Muslim Universitas Islam Riau Bisa Membaca Al-Qur'an,
Lembaga Dakwah Islam Kampus (LDIK) Universitas Islam Riau menyatakan bahwa:

KIKI DIAN PERLINA

Nomor Pokok Mahasiswa : 187110386

Lahir di Padang Panjang Tanggal Sebelas Agustus Tahun Dua Ribu
Mahasiswa Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
LULUS Tes Baca Al-Qur'an Dengan Predikat Baik



Diuji Pada : 11.07.19

Pekanbaru, 11 Juli 2019



Ketua,

Dr. H. Zulhelmy, S.E., M. Si., Ak C.A
NPK : 98 07 02 272

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :
PERPUSTAKAAN SOEMANHS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU